

**E-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung
Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi Bimma
(Bandung Integrated Manpower Management Applications)**

M. Andri Julianto P.¹; Dr. Slamet Usman Ismanto²; Dr. Dedi Sukarno³

Department Of Public Administration, Faculty Of Social And Political Sciences

¹andri.Kadut@Gmail.Com ; ²slametusmanismanto@Gmail.Com; ³dedisukarno@Gmail.Com

ABSTRACT

THIS RESEARCH WAS DISTRIBUTED BY THE EXISTENCE OF THE PHENOMENON OF CHANGING JOB FAIR SERVICES THAT GO AN OFFLINE SYSTEM TO AN ONLINE SYSTEM AND NOT ACHIEVING THE THREE PERFORMANCE TARGETS IN THE IMPLEMENTATION OF ONLINE JOB FAIR SERVICES THROUGH THE BIMMA APPLICATION. THE PURPOSE OF THIS RESEARCH IS TO FIND OUT HOW THE E-READINESS OF THE BANDUNG CITY MANPOWER SERVICE IN ORGANIZING ONLINE JOB FAIR MARKET SERVICES THROUGH THE BIMMA APPLICATION. THE RESEARCH METHOD USED IN THIS STUDY IS A QUALITATIVE METHOD WITH A DESCRIPTIVE APPROACH. DATA COLLECTION TECHNIQUES THROUGH OBSERVATION, INTERVIEWS, AND DOCUMENTATION. THE VALIDITY TECHNIQUE IS DONE BY TRIANGULATING SOURCES FROM THE RESULTS OF INTERVIEWS AND DOCUMENTATION STUDIES.

THE RESULTS OF THIS RESEARCH SHOWED THAT THE E-READINESS OF THE BANDUNG CITY MANPOWER SERVICE IN PROVIDING ONLINE JOB FAIR MARKET SERVICES THROUGH THE BIMMA APPLICATION WAS CONSIDERED READY ON THE GROUNDS THAT THERE WERE 5 (FIVE) FACTORS THAT HAD BEEN FULFILLED AND 1 (ONE) FACTOR THAT HAD NOT BEEN FULFILLED RELATED TO THE FACTORS AFFECTING E-READINESS OF THE BANDUNG CITY MANPOWER OFFICE. THESE FACTORS CAN BE SEEN FROM THE AVAILABILITY OF TELECOMMUNICATION INFRASTRUCTURE NEEDS, THE AVAILABILITY OF CONNECTIVITY AND THE USE OF IT BY THE GOVERNMENT BECAUSE THE FACILITIES HAVE BEEN USED AND MAINTAINED PROPERLY, THE FUNDS AND BUDGET ARE AVAILABLE ACCORDING TO THEIR NEEDS, THE LAW THAT REGULATES ONLINE JOB FAIR MARKET SERVICES IS AVAILABLE, AND THERE HAS BEEN A PARADIGM SHIFT BY GOVERNMENT EMPLOYEES. SUGGESTIONS FOR THIS PROBLEM ARE THE BANDUNG CITY MANPOWER SERVICE NEEDS TO PAY ATTENTION TO THE NEEDS OF FACILITIES AND INFRASTRUCTURE, REFINEMENT OF HUMAN RESOURCE PLANNING IN THE DIVISION OF TASKS, RE-ANALYZE THE WORKLOAD AND QUANTITY OF EMPLOYEES, TAKE DECISIVE ACTION IN CARRYING OUT TASKS ISSUING SANCTIONS, AND INCREASING THE INTENSITY OF DISCUSSION AND JOINT EVALUATION AMONG EMPLOYEES.

KEYWORDS: BANDUNG CITY MANPOWER, E-READINESS, ONLINE JOB FAIR SERVICES THROUGH THE BIMMA APPLICATION

ABSTRAK

PENELITIAN INI DILATABELAKANGI OLEH ADANYA FENOMENA PERUBAHAN PELAYANAN BURSA KERJA DARI SISTEM OFFLINE MENJADI SISTEM ONLINE SERTA TIDAK TERCAPAINYA TIGA CAPAIAN KINERJA SASARAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN BURSA KERJA ONLINE MELALUI APLIKASI BIMMA. TUJUAN DARI PENELITIAN INI UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA E-READINESS DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN BURSA KERJA ONLINE MELALUI APLIKASI BIMMA. METODE DALAM PENELITIAN INI ADALAH METODE KUALITATIF DENGAN PENDEKATAN DESKRIPTIF. TEKNIK PENGUMPULAN DATA MELALUI OBSERVASI, WAWANCARA, DAN STUDI DOKUMENTASI. TEKNIK KEABSAHAN DILAKUKAN DENGAN TRIANGULASI SUMBER DARI HASIL WAWANCARA DAN STUDI DOKUMENTASI.

HASIL PENELITIAN MENUNJUKAN BAHWA E-READINESS DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN BURSA KERJA ONLINE MELALUI APLIKASI BIMMA DINILAI SUDAH SIAP DENGAN ALASAN TELAH TERDAPAT 5 (LIMA) FAKTOR YANG SUDAH TERPENUHI DAN 1 (SATU) FAKTOR YANG BELUM TERPENUHI TERKAIT DENGAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI E-READINESS DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG. FAKTOR-FAKTOR TERSEBUT YAITU BISA DILIHAT DENGAN SUDAH TERSEDIAKANYA KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI, SUDAH BAIKNYA TINGKAT KONEKTIVITAS DAN PENGGUNAAN TI OLEH PEMERINTAH KARENA SARANA DAN PRASARANA TELAH DIMANFAATKAN DAN DIRAWAT DENGAN BAIK, SUDAH TERSEDIAKANYA DANA DAN ANGGARAN SESUAI DENGAN KEBUTUHANNYA, SUDAH TERSEDIAKANYA PERANGKAT HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PELAYANAN BURSA KERJA ONLINE, DAN SUDAH BAIKNYA PERUBAHAN PARADIGMA OLEH PARA PEGAWAI. SARAN YANG DIAJUKAN ATAS PENELITIAN INI IALAH DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG PERLU UNTUK MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA, MELAKUKAN PERENCANAAN SDM DALAM MELAKUKAN PEMBAGIAN TUGAS, MENGANALISIS KEMBALI ANTARA BEBAN KERJA DAN KUANTITAS PEGAWAI, MELAKUKAN TINDAKAN YANG TEGAS DALAM MENJALANKAN SANKSI, DAN MENINGKATKAN INTENSITAS DISKUSI DAN EVALUASI BERSAMA ANTAR PEGAWAI.

KATA KUNCI: DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG, E-READINESS, PELAYANAN BURSA KERJA ONLINE MELALUI APLIKASI BIMMA

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengurus daerahnya masing-masing sehingga setiap daerah dituntut untuk dapat mengembangkan kebijakan dalam mengatasi permasalahan daerah serta sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pemerintah Kota Bandung saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan pelayanan informasi ketenagakerjaan di Kota Bandung dengan menjadi suatu kota pintar atau *smart city*. Konsep *smart city* merupakan sebuah konsep tatanan kota pintar berbasis pelayanan, bersifat transparan dan berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Konsep *smart city* memberikan pelayanan informasi yang mudah untuk diakses tanpa terbatas oleh tempat dan waktu. Melalui pengembangan suatu konsep *smart city*, maka sejalan dengan hal itu dilakukan pula suatu penataan sistem manajemen informasi dan proses pelayanan publik dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemerintah tentu dituntut untuk dapat terus mengembangkan konsep *smart city* terutama dalam aspek pelayanan publik. Namun di samping itu, pemerintah juga dituntut untuk terus memberikan edukasi terhadap seluruh masyarakat baik di perkotaan ataupun pedesaan tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat berpartisipasi terhadap hak nya sebagai publik untuk mendapatkan pelayanan dan dapat peduli tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah atas program-program, kebijakan, peraturan (regulasi) dan komitmen pemerintah guna mewujudkan konsep *smart city*.

Pengembangan konsep *smart city* tidak hanya membutuhkan software dan hardware yang cerdas, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia sebagai pengguna yang cerdas (*smart people*). Pengguna yang cerdas (*smart people*) menjadi elemen yang cukup krusial, sementara teknologi hanya sebagai alat untuk memudahkan pengelolaan manajerial. Pengguna yang cerdas (*smart people*) mempunyai peran penting dalam mewujudkan *smart city*, hal ini dikarenakan dalam mewujudkan *smart city* diperlukan dukungan dari masyarakat untuk ikut terlibat sebagai pelaku dalam membangun *smart city*, ikut serta menjadi penentu arah perubahan kota, serta ikut aktif berinovasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pernah terjadi agar tidak terus terulang kembali.

Teknologi informasi dan komunikasi yang diciptakan, dioperasikan dan dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk menciptakan perubahan atas layanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien

kepada masyarakat, kepada privat, maupun kepada pemerintah itu sendiri disebut dengan *e-Government*. *E-Government* mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah serta memperkuat akuntabilitas pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pemerintah. Perkembangan *e-Government* selaras dengan hal yang berkaitan dengan kajian administrasi publik yaitu tentang bagaimana pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Pelayanan publik yang efektif dan efisien dapat menjadi solusi bagi masalah-masalah pemerintah seperti adanya kelambanan dalam pelayanan publik akibat adanya prosedur yang kompleks, adanya kualitas kebijakan yang buruk karena tidak tersedianya informasi yang dibutuhkan, serta efektivitas pengawasan yang rendah. Sehingga, penerapan layanan berbasis teknologi dalam instansi pemerintah diharapkan dapat menghasilkan output berupa kemudahan-kemudahan yang digunakan sebagai langkah pemerintah untuk menciptakan sebuah pelayanan yang akan lebih berdampak baik kepada seluruh pihak yang terlibat.

Namun, sebelum dapat menerapkan suatu program *e-Government*, instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan program *e-Government* tersebut harus mempunyai kesiapan yang cukup matang. Kesiapan yang dimaksud oleh peneliti disini merupakan kesiapan yang berkaitan dengan beberapa aspek penting yaitu, aspek finansial untuk dapat mendukung penerapan program *e-Government* tersebut dalam segi keuangan, aspek kompetensi pegawai baik dalam penggunaan teknologi secara umum maupun secara khusus terkait dengan program *e-Government* yang hendak diterapkan, aspek ketersediaan infrastruktur teknologi dalam mendukung sarana dan prasarana penerapan program *e-Government*, dan aspek-aspek lainnya yang saling berkaitan dalam kesiapan instansi pemerintah untuk menerapkan program *e-Government*. Aspek-aspek kesiapan seperti ini harus dimiliki oleh instansi pemerintah yang hendak menerapkan suatu program *e-Government*. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program *e-Government* yang akan diterapkan oleh instansi pemerintah akan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kesiapan dalam penerapan program *e-Government* inilah yang secara umum disebut sebagai *e-Readiness*. Oleh karena itu, dalam tulisan ini peneliti akan menganalisis tentang keberhasilan suatu persiapan dari segi pemerintah (*government centric*) dalam penerapan program *e-Government*.

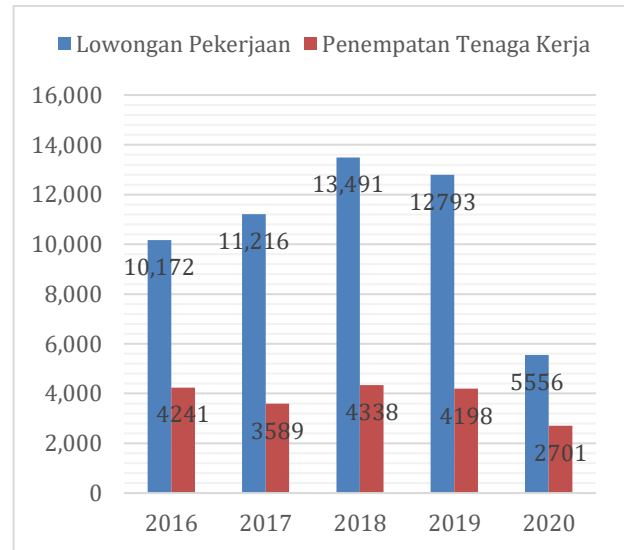
Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyediakan sistem inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi. Bentuk pelayanan ini adalah dengan menggelar program bursa kerja *online* yang ditujukan untuk para pencari kerja di Kota Bandung dengan melalui aplikasi BIMMA (*Bandung Integrated Manpower Management Application*). Bursa kerja

online merupakan pameran yang berfungsi untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak pencari kerja dan pihak yang membutuhkan tenaga kerja secara *online*. Berdasarkan penjelasan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menjelaskan bahwa program bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA ini merupakan suatu sistem informasi terpadu manajemen ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menyediakan informasi pasar kerja bagi masyarakat, meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja masyarakat, memudahkan pengelolaan data tenaga kerja dan bursa kerja, serta menciptakan daya saing aplikasi BIMMA dengan aplikasi pencarian kerja yang lainnya.

Sebelum hadirnya layanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA, pelayanan informasi lowongan pekerjaan dan pelayanan lamaran kerja tidak dapat diakses setiap waktu dan hanya dapat diakses pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan jadwal program bursa kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Selain itu, untuk dapat mencari informasi lowongan pekerjaan di setiap perusahaan yang mengikuti program bursa kerja tersebut, para pencari kerja harus melakukan pengunjungan ke setiap stand (*booth*) dimana perusahaan tersebut menginformasikan lowongan pekerjaan dan selanjutnya pencari kerja akan melakukan pendaftaran diri terhadap lowongan pekerjaan tersebut secara *offline*. Namun, dengan munculnya program bursa kerja yang dapat diakses secara *online* melalui aplikasi BIMMA, hal ini menjadi suatu bentuk pembaharuan dalam pelayanan informasi lowongan pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang terfokus kepada pelayanan informasi yang efektif, efisien, cepat serta tepat dalam melayani kebutuhan masyarakat. Dengan adanya kemudahan layanan informasi lowongan pekerjaan melalui aplikasi BIMMA, maka Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat melaksanakan pelayanan informasi lowongan pekerjaan secara *realtime*, sehingga para pencari kerja dapat mengakses layanan informasi lowongan pekerjaan setiap saat tanpa terbatas oleh waktu. Selain itu, para pencari kerja juga akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan pendaftaran diri terhadap informasi lowongan pekerjaan, karena proses pendaftaran diri yang dilakukan oleh para pencari kerja sudah dapat dilakukan secara *online*.

Dalam pelaksanaan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA terdapat 3 (tiga) capaian kinerja sasaran, ketiga capaian kinerja sasaran tersebut menjadi ukuran keberhasilan dari pelaksanaan pelayanan bursa kerja *online*. Capaian kinerja sasaran tersebut antara lain seperti, penempatan tenaga kerja, informasi lowongan pekerjaan baru, dan pencari kerja yang terdaftar di aplikasi BIMMA. Pada capaian kinerja sasaran penempatan tenaga kerja yang dijelaskan dalam LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menjelaskan bahwa pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 telah terjadi peningkatan dan penurunan jumlah penempatan

tenaga kerja bagi pengguna aplikasi BIMMA. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan pada grafik di bawah ini.



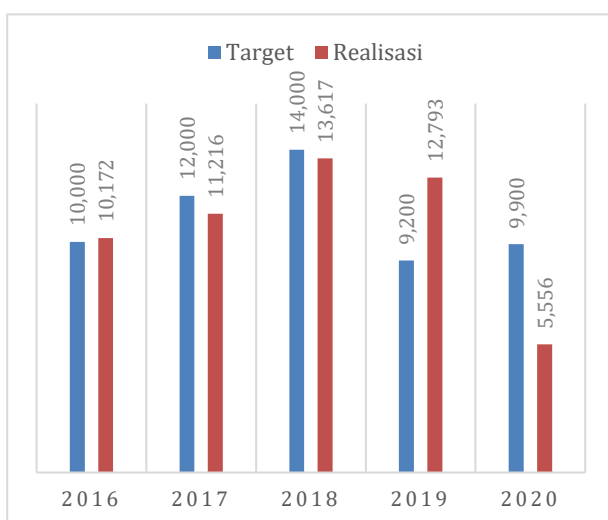
Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Lowongan Kerja yang Tersedia dan Penempatan Tenaga Kerja pada Aplikasi BIMMA Tahun 2016-2020

(Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020)

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 proses penempatan tenaga kerja pada aplikasi BIMMA selalu mengalami kesenjangan antara penempatan tenaga kerja dan lowongan kerja yang tersedia. Berdasarkan data dari LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 menjelaskan bahwa persentase keberhasilan penempatan tenaga kerja pada tahun 2016 mencapai 35%, pada tahun 2017 mencapai 33,33%, pada tahun 2018 mencapai 28,57%, pada tahun 2019 mencapai 44,56%, dan pada tahun 2020 mencapai 48, 61%. Terjadinya penurunan angka penempatan tenaga kerja pada bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA berdasarkan penjelasan dari LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 menjelaskan bahwa pencari kerja yang ingin memperoleh pekerjaan dari pemberi kerja untuk pengisian lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, serta tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang tersedia atau dalam istilah ketenagakerjaan disebut antara lowongan pekerjaan yang tersedia dengan pencari kerja tidak *link and match*. Sehingga, dalam mengatasi kebutuhan tenaga kerja agar dapat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan lowongan pekerjaan yang tersedia, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung melalui UPT Balai Latihan Kerja (BLK) melakukan suatu pelatihan-pelatihan kepada para pencari kerja. Namun dalam proses pelatihan tersebut, UPT Balai Latihan Kerja (BLK) yang berusaha untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas calon tenaga kerja agar dapat

memenuhi kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan lowongan pekerjaan, sampai saat ini belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, lalu pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi masih kurang baik dalam penyelenggaraannya karena masih banyak campur tangan dari berbagai pihak, dan belum adanya koordinasi antara penyedia pelatihan dengan industri sebagai pemakai tenaga kerja sehingga program pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Lebih dari itu, saat ini masih terdapat permasalahan kinerja dari pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengurus bursa kerja *online* untuk melakukan pencatatan dan pelaporan mengenai penempatan tenaga kerja.

Capaian kinerja sasaran selanjutnya yaitu terkait dengan informasi lowongan pekerjaan baru, berdasarkan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menjelaskan dampak dari adanya aplikasi BIMMA ini terlihat dari peningkatan informasi lowongan pekerjaan baru sejak munculnya aplikasi BIMMA. Sejak diresmikannya aplikasi BIMMA pada tahun 2016, jumlah informasi lowongan pekerjaan baru selalu mengalami peningkatan dan selalu mencapai target selama tahun 2017 dan tahun 2018. Kemudian, pada tahun 2019 walaupun jumlah informasi lowongan pekerjaan mengalami penurunan, namun jumlah informasi lowongan pekerjaan pada aplikasi BIMMA masih dapat mencapai pada targetnya. Tetapi, pada tahun 2020 telah terjadi penurunan jumlah lowongan pekerjaan yang cukup tinggi sehingga target terhadap informasi jumlah lowongan pekerjaan pada aplikasi BIMMA pada tahun 2020 tidak dapat tercapai. Untuk dapat melihat secara rinci antara target dan realisasi informasi lowongan pekerjaan pada aplikasi BIMMA dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

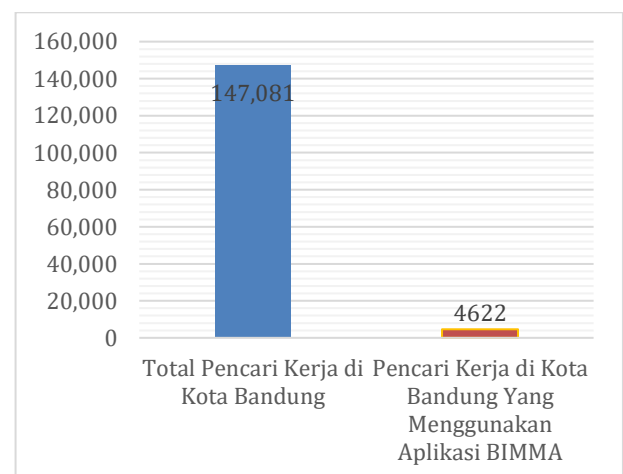


Gambar 1.2 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Informasi Lowongan Pekerjaan pada Aplikasi BIMMA Tahun 2016-2020

(Sumber : LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020)

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan dan penurunan jumlah informasi lowongan pekerjaan baru pada aplikasi BIMMA. Berdasarkan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2020 menjelaskan bahwa terjadinya penurunan informasi lowongan pekerjaan baru pada bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA dikarenakan tidak ditegakkannya suatu sanksi yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan wajib lapor lowongan di aplikasi BIMMA. Sehingga, hal ini akan dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesadaran dari pihak perusahaan untuk melakukan wajib lapor lowongan di aplikasi BIMMA. Selain itu, pada tahun 2019 dan 2020 telah terjadi perubahan lanskap pasar tenaga kerja akibat krisis ekonomi karena sedang terjadi pandemik *Covid-19* yang berdampak kepada semua sektor pekerjaan.

Capaian kinerja sasaran selanjutnya yaitu terkait dengan jumlah pengguna dari aplikasi BIMMA tersebut. Berkaitan dengan jumlah pengguna pada aplikasi BIMMA, menurut LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menjelaskan bahwa jumlah pencari kerja yang menggunakan aplikasi BIMMA pada tahun 2020 terdapat sebanyak 4.622 pencari kerja yang telah terdaftar. Sementara, menurut dokumen Bandung Dalam Angka Tahun 2020 menjelaskan bahwa jumlah pencari kerja di Kota Bandung yang telah terdaftar berjumlah 147.081 pencari kerja. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang telah terdaftar dengan jumlah pencari kerja yang menggunakan aplikasi BIMMA pada tahun 2020 pada grafik di bawah ini.



Gambar 1.3 Grafik Perbandingan Jumlah Pencari Kerja di Kota Bandung yang Terdaftar dan Jumlah Pencari Kerja di Kota Bandung yang Menggunakan Aplikasi BIMMA Tahun 2020

(Sumber: Diolah peneliti dari LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2020 dan Bandung Dalam Angka Tahun 2020)

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa angka pencari kerja yang menggunakan aplikasi BIMMA hanya sebagian kecil dari total pencari kerja di Kota Bandung. Hal ini terbukti dari jumlah pencari kerja di Kota Bandung yang telah terdaftar berjumlah 147.081 pencari kerja, dan dari jumlah pencari kerja tersebut hanya terdapat 4.622 pencari kerja yang menggunakan aplikasi BIMMA untuk mencari informasi tentang lowongan pekerjaan. Berdasarkan LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2020 menjelaskan bahwa terjadinya tingkatan jumlah yang rendah terhadap pengguna aplikasi BIMMA dibandingkan dengan total jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kota Bandung terjadi karena terdapatnya aplikasi pencari kerja lainnya yang lebih diminati oleh masyarakat Kota Bandung sehingga aplikasi BIMMA sulit untuk dapat bersaing dengan aplikasi-aplikasi pencari kerja lainnya tersebut.

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis mengenai persiapan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA pada tahun 2020. Peneliti memfokuskan analisis mengenai persiapan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA di tahun 2020 karena pada tahun 2020 telah terjadi perubahan lanskap pasar tenaga kerja akibat krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19*, selain itu terdapat juga kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menuntut pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan efektif dan efisien dengan berbasis *online* atau dengan kata lain meminimalisir pelayanan tatap muka untuk mengurangi penyebaran virus *Covid-19* sesuai dengan kebijakan dari pemerintah. Dengan terjadinya perubahan lanskap pasar tenaga kerja yang seperti ini, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk dapat beradaptasi dalam beberapa persiapan-persiapan penting dalam menyelenggarakan program *e-Government* seperti bagaimana memenuhi kebutuhan infrastruktur telekomunikasi dalam melakukan program *e-Government*, bagaimana proses pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam melakukan program *e-Government*, bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pegawai sesuai dengan kebutuhannya, bagaimana ketersediaan anggaran dan dana nya dalam menjalankan program *e-Government*, bagaimana ketersediaan aturan hukum yang mengatur tentang program *e-Government* tersebut, serta bagaimana kesiapan perubahan paradigma dari para pegawai dalam beradaptasi ke sistem pelayanan yang berbasis elektronik.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti melihat bahwa pelaksanaan pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA belum terlaksana dengan baik. Masih terdapat beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki dalam proses persiapan

penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA ini agar penyelenggaraan pelayanan nya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan pelayanan bursa kerja *online*, peneliti menemukan beberapa indikasi masalah mengenai *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam pelaksanaan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA, yakni:

1. Berdasarkan penjelasan dari Staf Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat diketahui bahwa terjadi suatu tumpang tindih tanggungjawab antara pegawai tetap sebagai pihak pertama dan pegawai kontrak sebagai pihak ketiga dalam melakukan tugas pengelolaan aplikasi BIMMA, hal ini dapat terlihat dari tanggungjawab dan tugas yang sama antara pegawai tetap sebagai pihak pertama dan pegawai kontrak sebagai pihak ketiga dalam melakukan pengelolaan aplikasi BIMMA.

Tabel 1.1 Tugas Pengelolaan Aplikasi BIMMA

No.	Tugas Pengelolaan Aplikasi BIMMA	Unit Kerja
1.	Penginputan data diri pengguna dalam melakukan pendaftaran diri	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	Pembuatan kartu AK-1 untuk pengguna baru	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	Penginputan informasi lowongan pekerjaan yang tersedia ke aplikasi	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.	Memproses data pengguna yang melakukan lamaran <i>online</i> kepada perusahaan yang telah didaftarkan	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.	Pendataan perusahaan yang melakukan operasi bisnis di wilayah Kota Bandung	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Sumber: Data dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2020)

- Menurut penjelasan dari Staf Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat diketahui bahwa telah dilakukan rekrutmen pegawai kontrak sebagai pihak ketiga yang mempunyai tugas untuk membuat aplikasi BIMMA pada tahun 2016, namun sampai dengan saat ini Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung masih melibatkan pihak ketiga tersebut dalam melakukan pengelolaan aplikasi BIMMA, padahal untuk melakukan tugas tersebut sudah terdapat pegawai tetap dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang menjalankannya. Sehingga, peneliti menduga bahwa terjadi ketidakefektifan dalam perencanaan sumber daya manusia untuk melakukan pengelolaan aplikasi BIMMA karena terjadinya tumpang tindih tanggungjawab antara pegawai tetap sebagai pihak pertama dan pegawai kontrak sebagai pihak ketiga.
2. Berdasarkan penjelasan dari Staf Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat diketahui bahwa telah terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan jumlah pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam melakukan tugas pencarian lowongan pekerjaan dari setiap perusahaan yang telah terdaftar di Kota Bandung. Pihak Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mempunyai tugas untuk melakukan pencarian lowongan pekerjaan dengan cara menghampiri setiap perusahaan yang telah terdaftar yang berjumlah 4.656 perusahaan pada tahun 2020.

Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Perusahaan yang Terdaftar dan Jumlah Pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

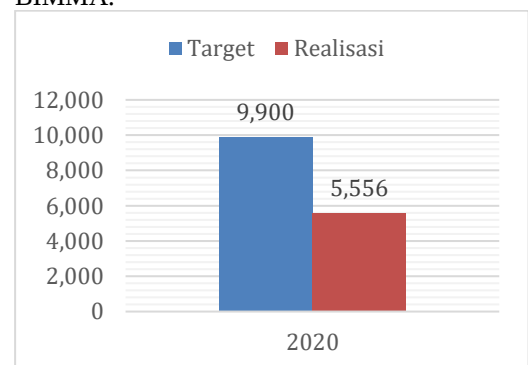
No.	Tahun	Jumlah Perusahaan yang Terdaftar	Jumlah Pegawai yang Tersedia
1.	2019	5.711 Perusahaan	13 Pegawai
2.	2020	4.656 Perusahaan	13 Pegawai

(Sumber: Data dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2020)

Jumlah pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja

Kota Bandung yang mempunyai tanggungjawab dalam melakukan tugas untuk pencarian lowongan pekerjaan berjumlah 13 (tiga belas) pegawai, namun dari jumlah tersebut hanya terdapat 6 (enam) pegawai saja yang menjalankan tanggungjawab untuk mencari informasi lowongan pekerjaan tersebut ke setiap perusahaan yang telah terdaftar. Sehingga, peneliti menduga bahwa pencarian lowongan pekerjaan dari setiap perusahaan yang telah terdaftar di Kota Bandung yang dilakukan oleh Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung masih belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat kesenjangan dalam pemanfaatan jumlah pegawai untuk menjalankan tugas pencarian lowongan pekerjaan di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

3. Berdasarkan penjelasan dari Staf Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung serta penjelasan yang tertera di LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2020 dapat diketahui bahwa dalam wajib lapor lowongan pekerjaan di aplikasi BIMMA, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tidak menegakkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan wajib lapor lowongan pekerjaan ke aplikasi BIMMA.



Gambar 1.4 Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Informasi Lowongan Pekerjaan di Aplikasi BIMMA pada Tahun 2020

(Sumber: LKIP Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2020)

Sehingga, peneliti menduga bahwa dengan tidak ditegakkannya sanksi yang tegas dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung akan dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kesadaran dari pihak perusahaan untuk melakukan wajib lapor lowongan di aplikasi BIMMA serta berdampak terhadap jumlah informasi lowongan pekerjaan yang tersedia pada aplikasi BIMMA.

Berdasarkan dari latar belakang dan indikasi masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang akan digagas dalam skripsi ini dengan judul, “*E-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja *Online* melalui Aplikasi BIMMA (*Bandung Integrated Manpower Management Application*)”.

METODE PENELITIAN

3.2.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian mengenai *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA (*Bandung Intergrated Manpower Management Application*), peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial. Pendekatan penelitian kualitatif juga merupakan peneitian yang bermaksud untuk memahami fenomena secara holistik. Pada pendekatan ini, peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2.2 Desain Penelitian

Dalam penelitian mengenai *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA (*Bandung Intergrated Manpower Management Application*), peneliti menggunakan desain “Penelitian Studi Kasus (*Case Studies Research*)”. Di dalam desain penelitian ini, penelitian dilakukan dengan mengembangkan analisis mendalam tentang suatu kasus, sering kali berupa program, kegiatan, atau proses. Penelitian dilakukan dengan cara sistematis mulai dari melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasil.

3.2.3 Metode Penelitian Kualitatif

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Dimana dalam proses penelitian yang digunakan berdasarkan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk menemukan solusi dalam permasalahan tersebut.

Peneliti menggunakan metode ini karena dalam penulisan yang dilakukan oleh peneliti akan menganalisis dan mendeskripsikan mengenai *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA (*Bandung Intergrated Manpower Management Application*). Selain itu, dengan

menggunakan penulisan kualitatif peneliti akan mengetahui gambaran aktual yang terjadi dan memperoleh pemahaman atas fenomena yang ada.

3.2.4 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam peneltian ini diperlukan suatu batasan-batasan yang bertujuan untuk menjaga konsistensi dari tujuan penelitian itu sendiri, sehingga peneliti membatasi penelitian ini terhadap *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA (*Bandung Intergrated Manpower Management Application*) dengan beberapa aspek yang akan diteliti kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, aspek-aspek dalam menganalisis *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA (*Bandung Intergrated Manpower Management Application*) mencakup 6 aspek yang telah dijelaskan oleh Indrajit (2007) sebagai berikut:

1. Infrastruktur Telekomunikasi
 - a. Menganalisis apakah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung memiliki sarana dan prasarana infrastuktur telekomunikasi yang mencukupi dari segi kuantitasnya nya dan memadai dari segi kualitasnya untuk penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA (*Bandung Integrated Manpower Management Application*).
2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah
 - a. Menganalisis tentang sejauh mana Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat melakukan pemanfaatan dan perawatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA (*Bandung Intergrated Manpower Management Application*).
3. Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintah
 - a. Menganalisis bagaimana kesiapan sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari segi perencanaan dan pemberdayaan pegawai dalam penerapan layanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA (*Bandung Integrated Manpower Management Application*).
4. Ketersediaan Dana dan Anggaran
 - a. Menganalisis apakah terdapat dana untuk penyelenggaraan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA (*Bandung Integrated Manpower Management Application*)
 - b. Menganalisis apakah dana tersebut dapat mencukupi dari total keseluruhan kebutuhan biaya perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan, aplikasi BIMMA serta menganalisis apakah dana tersebut dialokasikan secara tepat untuk pelaksanaan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA

(*Bandung Integrated Manpower Management Application*).

5. Perangkat Hukum

- a. Menganalisis apakah terdapat undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan *e-Government* khususnya penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

6. Perubahan Paradigma

- a. Menganalisis bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penggunaan sistem teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA (*Bandung Integrated Manpower Management Application*).

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data, Instrumen, dan Perlengkapan Penelitian

3.2.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan suatu penelitian, hal ini dikarenakan teknik pengumpulan data sangat berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Pada kondisi pandemi *Covid-19* yang terjadi pada saat ini sangat berpengaruh terhadap proses pengumpulan data di dalam proses penelitian, seorang peneliti diharuskan untuk menjaga jarak (*physical* dan *social distancing*) sebagai upaya dalam pencegahan penularan *Covid-19* di tengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjelaskan bahwa kondisi pandemi *Covid-19* menyebabkan kegiatan penelitian mengalami keterbatasan untuk berinteraksi secara fisik dan tidak bisa melakukan wawancara secara tatap muka dengan informan penelitian secara langsung (Puspita 2020:1). Sehingga, penelitian dengan melakukan pengambilan data melalui metode digital dalam proses penelitian adalah alternatif teknik pengambilan data dan metode penelitian yang relevan untuk dilakukan di masa pandemi *Covid-19*.

Proses pengumpulan data merupakan langkah yang paling pokok dalam penelitian, karena penelitian bertujuan untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan memperoleh data yang mencukupi standar data yang ditetapkan. Dalam masa pandemi *Covid-19* dan era revolusi 4.0 seperti saat ini telah membangun digitalisasi dalam dunia penelitian sehingga teknik pengumpulan data kualitatif di era digital dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Wawancara dilakukan dengan menggunakan video konferensi,
- b. Penggunaan artikel dari jurnal akses terbuka maupun berbayar,
- c. Pengamatan terhadap situasi dan subjek penelitian dapat dilakukan secara cermat

dengan memutar ulang rekaman video dan dapat dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) secara daring. (Zulfa et al. 2020:151)

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam masa pandemi *Covid-19* ini dapat membangun digitalisasi dalam melakukan pengumpulan data untuk keperluan penelitian, beberapa tahapan untuk dapat melakukan pengumpulan data melalui media digital dapat dilakukan dengan melakukan wawancara secara *online* atau dengan video konferensi sehingga antara peneliti dan informan penelitian tetap bisa melakukan wawancara walaupun tidak dilakukan secara langsung, lalu pengumpulan data melalui media digital juga bisa dilakukan dengan penggunaan artikel atau jurnal dengan akses terbuka atau yang berbayar, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan yang bersumber dari artikel ataupun jurnal, dan yang terakhir untuk melakukan pengumpulan data melalui media digital bisa dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) secara daring.

Selain itu, Firman (2020) juga menjelaskan beberapa strategi untuk melakukan pengumpulan data dalam masa pandemi *Covid-19* dengan melalui metode digital, strategi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Komputer, aplikasi media sosial, dan adanya jaringan internet mampu untuk mengumpulkan data di lapangan dengan cepat dan hasil yang diharapkan juga bisa lebih baik
2. Pengumpulan data melalui kuesioner yang diisi secara *online*
3. Pengumpulan data melalui telepon ke responden adalah cara yang paling sesuai di masa pandemi *Covid-19* dibandingkan dengan cara biasa dengan bertatap muka langsung dengan responden
4. Pemahaman dalam pengisian data oleh responden harus dipastikan sama dengan maksud data yang akan diisi untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengisian form data. (Firman 2020:92)

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk proses pengumpulan data dalam masa pandemi *Covid-19* yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui media sosial, hal ini diketahui bahwa dalam melakukan riset melalui media sosial mampu untuk mengumpulkan data di lapangan dengan cepat dan hasil yang diharapkan juga bisa lebih baik, lalu melakukan pengumpulan data dengan cara melalui telepon, hal ini juga menjadi cara yang paling sesuai di masa pandemi *Covid-19* dibandingkan dengan cara biasa dengan bertatap muka langsung dengan informan, lalu yang terakhir ialah melakukan pengumpulan data melalui kuesioner yang diisi secara *online*. Namun, untuk melakukan pengumpulan data melalui kuesioner yang diisi secara *online*, pemahaman

dalam pengisian data oleh responden harus dipastikan sama dengan maksud data yang akan diisi untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengisian data.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Penjelasan mengenai data primer dan data sekunder sebagai berikut:

3.2.5.1.1 Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari:

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan secara mendalam. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah teknik wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi fenomena di lapangan artinya pelaksanaan tanya jawab dapat beradaptasi seperti dalam percakapan sehari-hari.

Adapun kisi-kisi wawancara yang tidak terstruktur pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan peneliti kepada informan dan dapat berkembang saat wawancara berlangsung. Pertanyaan ini dibuat sederhana dan disesuaikan dengan kondisi agar peneliti maupun informan dapat saling memahami.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dan informasi dengan cara melaksanakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Dalam hal ini objek sasaran yang menjadi objek penelitian peneliti untuk melakukan observasi atau pengamatan secara langsung ialah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang belum diperoleh selama wawancara.

3.2.5.1.2 Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi literatur atau kepustakaan

Dalam studi literatur dan kepustakaan, peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai referensi baik buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi pemerintah yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

3.2.5.2 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian mengenai *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitiannya dan dalam penelitian ini instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen penelitian juga harus dibuktikan seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Pembuktian terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi pembuktian terhadap pemahaman metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.

3.2.5.3 Perlengkapan Penelitian

Perlengkapan penelitian yang dimaksud oleh peneliti adalah suatu alat-alat yang digunakan peneliti sebagai bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditentukan oleh peneliti. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa perlengkapan penelitian seperti, *gadget* sebagai alat perekam, alat untuk mengambil gambar, alat untuk mendokumentasikan interaksi antara peneliti dan narasumber serta buku catatan dan alat tulis sebagai alat untuk mencatat hasil wawancara.

3.2.6 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan dengan cara *purposive*. Penentuan informan dengan cara *purposive* merupakan suatu teknik penentuan informan dengan mempertimbangkan pertimbangan tertentu dengan berdasarkan kapasitas dan kapabilitas diri seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap permasalahan penelitian dan memiliki jabatan tertentu yang relevan sehingga dapat memberikan informasi kepada peneliti untuk

mempelajari objek/situasi yang akan diteliti atau bisa juga informan yang terlibat dengan *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA (*Bandung Intergrated Manpower Management Application*) sehingga peneliti merasa bahwa informasi tersebut merupakan informan yang tepat karena akan memahami secara keseluruhan mengenai *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA (*Bandung Intergrated Manpower Management Application*).

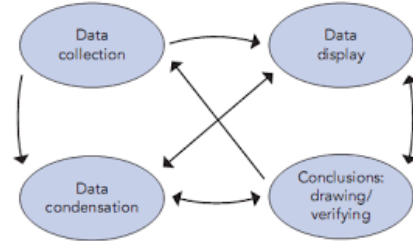
Informan yang menjadi sumber informasi adalah informan yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan.

No.	Posisi Informan	Jumlah	Informan	Informasi yang di Peroleh
1.	Pegawai dari Tim Pengembangan Aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung	1 (satu)	Informan 1 (Key Informan)	Untuk mengetahui apakah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung memiliki sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang cukup untuk penerapan konsep <i>e-Government</i> dalam pelayanan bursa kerja <i>online</i> pada aplikasi BIMMA (<i>Bandung Intergrated Manpower Management Application</i>) dan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat memanfaatkan dan merawat sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.
2.	Pegawai dari Bidang Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang Mengelola Aplikasi BIMMA	1 (satu)	Informan 2 (Key Informan)	Untuk mengetahui apakah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung memiliki sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang cukup untuk penerapan konsep <i>e-Government</i> dalam pelayanan

				bursa kerja <i>online</i> pada aplikasi BIMMA dan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat memanfaatkan dan merawat sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.
3.	Kepala Bidang Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung	1 (satu)	Informan 3 (Key Informan)	Untuk mengetahui bagaimana kesiapan sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penerapan layanan bursa kerja <i>online</i> melalui aplikasi BIMMA, untuk mengetahui apakah terdapat undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan bursa kerja <i>online</i> melalui aplikasi BIMMA, dan untuk mengetahui bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penggunaan sistem teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan bursa kerja <i>online</i> melalui aplikasi BIMMA.
4.	Pegawai dari Sub Bidang Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung	1 (satu)	Informan 4 (Key Informan)	Untuk mengetahui apakah terdapat dana untuk penyelenggaraan bursa kerja <i>online</i> melalui aplikasi BIMMA dan untuk mengetahui apakah dana tersebut dapat mencukupi dari total keseluruhan kebutuhan biaya penyelenggaraan bursa kerja <i>online</i> melalui aplikasi BIMMA.
5.	Pegawai Bidang	2 (dua)	Informan 5 dan 6	Untuk mengetahui

	Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung		(Secondary Informan)	bagaimana kesiapan SDM pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penerapan layanan bursa kerja <i>online</i> melalui aplikasi BIMMA, untuk mengetahui bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penggunaan sistem teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan bursa kerja <i>online</i> melalui aplikasi BIMMA.
6.	Masyarakat sebagai pengguna aplikasi BIMMA	2 (dua)	Informan 7 dan 8 (Secondary Informan)	Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap perangkat hukum yang berkaitan dengan pelayanan bursa kerja <i>online</i> , untuk mengetahui sejauhmana sosialisasi diberikan kepada masyarakat tentang pelayanan bursa kerja <i>online</i> , untuk mengetahui kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan bursa kerja <i>online</i> , serta untuk meminta saran masyarakat terhadap pelayanan bursa kerja <i>online</i> .
Jumlah		8 orang		

tersebut dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut penjelasan selengkapanya:



Gambar 3.1 Foto Model Interaktif dalam Analisa Data

(Sumber: Miles, Huberman, and Saldaña (2014))

a) **Kondensasi Data (Data Condensation)**

Dalam kondensasi data, merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), peringkasan (*abstracting*), penyederhanaan (*simplifying*), dan transformasi (*transforming*) data. Proses pemilihan (*selecting*) menuntut peneliti untuk bertindak selektif dalam menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting dan hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna. Selanjutnya, dalam tahap pengerucutan (*focusing*) peneliti memfokuskan setiap data berdasarkan pada masing-masing rumusan masalah dalam penelitian. Lalu, dalam tahap peringkasan (*abstracting*) peneliti membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan nya perlu dijaga sehingga tetap berada di dalam konteks pembahasan. Terakhir, pada tahap penyederhanaan (*simplifying*) dan transformasi (*transforming*) peneliti melakukan penyederhanaan dan transformasi data ke dalam beberapa cara seperti, melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data ke dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

b) **Penyajian Data (Data Display)**

Penyajian data merupakan kegiatan untuk melakukan penyusunan terhadap sekumpulan informasi, sehingga tindakan tersebut dapat memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Maka dari itu, setelah data telah dikondensasi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang

3.2.7 Perencanaan Pengolahan dan Analisa Data

3.2.7.1 Tahapan Proses Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman and Saldana (2014) untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dengan tiga kegiatan penting, diantaranya; kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Kegiatan

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

- c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses ketika peneliti menginterpretasikan data dari awal hingga akhir pengumpulan data yang disertai pembuatan pola atau uraian dan penjelasan. Peneliti menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Penarikan kesimpulan ini merupakan suatu bukti terhadap penelitian yang dilakukan.

3.2.7.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Keandalan dari suatu alat pengukuran didefinisikan sebagai kemampuan alat untuk mengukur gejala secara konsisten yang dirancang untuk mengukur. Sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik triangulasi sumber dapat pula dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya, misalnya narasumber tertentu, dari aktivitas yang menggambarkan perilaku orang, atau dari sumber yang berupa catatan atau arsip dan dokumen.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan beberapa teknik itu didapat data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena dari sudut pandang yang berbeda-beda.

3.2.8 Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian dalam penelitian ini ialah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang beralamat di Jalan R.A.A. Marta Negara Nomor 4, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40264.

PENELITIAN TERKAIT

Dalam melakukan penelitian terkait dengan *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui

aplikasi BIMMA, peneliti memiliki beberapa sumber penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam membantu peneliti melakukan penelitian ini karena penelitian-penelitian tersebut dianggap relevan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian mengenai *e-Readiness* pada program-program pemerintah sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan perspektif yang berbeda-beda. Beberapa penelitian tentang *e-Readiness* dalam program-program pemerintah pernah dilakukan oleh peneliti dari berbagai negara, seperti penelitian dari Azab (2009) meninjau beberapa *e-Readiness* dalam penilaian keberhasilan *e-Government* pada skala organisasi publik, Hussin and Saman (2015) mencoba untuk meninjau faktor-faktor yang dapat memengaruhi *e-Readiness* pemerintah Dubai untuk inisiatif *e-Government*, Kagoya, Maiga, and Jani (2018) mencoba untuk menganalisis *e-Readiness* pada program *e-Government* pada kementerian di Uganda, Abdulwahid, Salman, and Ouda (2019) mengidentifikasi dan menilai keberhasilan *e-Government* pada organisasi publik di Irak, dan Cedric (2020) menilai kesiapan *e-government* dari beberapa lembaga Pemerintah di Burundi.

Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti tentang *e-Readiness* dalam program pemerintah daerah di Indonesia, seperti penelitian dari Nugroho (2020) mengkaji model *e-Readiness* dalam implementasi *e-Government*, Epa, Lukman, and Wargadinata (2019) mencoba untuk menganalisis *e-Readiness* Kabupaten Mamberamo Tengah dalam Penerapan *e-Planning*, Putri (2018) mengukur *e-Readiness* dalam penerapan *e-Government* di Kepulauan Riau, dan Nento, Nugroho, and Selo (2017) melakukan pengukuran *e-Readiness* Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penerapan *smart government*. Lalu, terdapat penelitian lainnya yang juga membahas tentang aplikasi BIMMA yaitu penelitian dari Sinaga (2018) yang membahas tentang bagaimana efektivitas pelayanan aplikasi BIMMA dan penelitian dari Hakim (2017) yang membahas tentang pelaksanaan aplikasi BIMMA dalam mempermudah masyarakat untuk mencari informasi lowongan pekerjaan.

HASIL DAN DISKUSI

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya mengenai *e-Readiness* (kesiapan *e-Government*) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA (*Bandung Intergrated Manpower Management Application*) khususnya untuk menciptakan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan yang efektif dan efisien di Kota Bandung. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam pelaksanaan *e-Government* untuk menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA itu sendiri mengingat bahwa dalam

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja menjelaskan bahwa informasi lowongan pekerjaan bersifat terbuka dan penyajian serta penyebaran informasi pasar kerja wajib dilakukan melalui media *online*. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai salah satu isu yang erat kaitannya dengan administrasi publik, yaitu mengenai bidang ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam bentuk program pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Isu ketenagakerjaan menjadi salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian intens dari pemerintah dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan isu ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan permasalahan kependudukan dan pengangguran bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena percepatan pertumbuhan angkatan kerja tidak dibarengi dengan percepatan pertumbuhan lapangan pekerjaan atau jumlah penawaran tenaga kerja tidak seimbang dengan meningkatnya jumlah permintaan tenaga kerja. Sehingga, dibutuhkan suatu inovasi-inovasi pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan yang dapat membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi lowongan pekerjaan secara cepat dan tepat yang pada akhirnya hal ini akan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti juga akan mengemukakan temuan penelitian di lapangan saat melakukan penelitian kepada pihak-pihak yang menjadi informan khususnya pada pihak yang terlibat dalam *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam pelaksanaan *e-Government* dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA berdasarkan landasan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu seperti yang dikemukakan oleh Indrajit dengan menggunakan 6 (enam) aspek yang menentukan kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan *e-Government*, selain itu peneliti juga menemukan satu aspek lainnya sebagai temuan penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Infrastruktur telekomunikasi,
2. Tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah,
3. Kesiapan sumber daya manusia di pemerintah,
4. Ketersediaan dana dan anggaran,
5. Perangkat hukum,
6. Perubahan paradigma,
7. Pandangan masyarakat.

4.1 Infrastruktur Telekomunikasi

Infrastruktur telekomunikasi adalah suatu sarana dan prasarana yang menjadi suatu kebutuhan khusus untuk dapat menyediakan layanan telekomunikasi, internet dan/atau penyiaran. Infrastruktur telekomunikasi juga merupakan struktur sarana dan prasarana fisik yang mendasari jaringan komunikasi yang saling terbentuk dan merupakan suatu pendukung untuk layanan komunikasi jarak jauh.

Infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam menunjang keberhasilan *e-Government* yang dilakukan di dalam sebuah instansi pemerintah, hal ini dikarenakan keberadaan teknologi yang terus semakin berkembang dan banyaknya kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dalam sektor pemerintahan, menjadikan peran infrastruktur telekomunikasi menjadi sangat vital. Untuk itu, dalam mengelola suatu program *e-Government* perlu diperhatikan tentang ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya dalam rangka menciptakan program *e-Government* yang efektif dan efisien. Pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan sebelumnya tentang bagaimana *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung terkait dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam menunjang pelaksanaan *e-Government*. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini.

4.1.1 Kuantitas Infrastruktur Telekomunikasi yang Tersedia

Dalam proses persiapan untuk menyelenggarakan program *e-Government* di instansi pemerintah perlu untuk memastikan apakah kuantitas infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia telah mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh para pegawai. Hal tersebut dikarenakan kuantitas dari infrastruktur telekomunikasi yang disediakan akan sangat membawa pengaruh kepada hasil yang efektif dan efisien oleh instansi pemerintah tersebut. Kuantitas infrastruktur telekomunikasi yang disediakan pun akan mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Dengan semakin lengkapnya infrastruktur telekomunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat tersedia dengan baik, maka semakin baik pula hasil dari pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA serta Tim Pengembang Aplikasi BIMMA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa infrastruktur telekomunikasi yang tersedia dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA terbagi menjadi 2 cakupan, yaitu cakupan infrastruktur *hardware* yang berupa perangkat elektronik seperti komputer, *printer*, *scanner*, dan *server*. Lalu, terdapat juga cakupan infrastruktur jaringan yang berupa jaringan internet (*wifi*) yang disediakan dan terkoneksi ke setiap bagian yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Perangkat elektronik merupakan salah satu infrastruktur telekomunikasi utama dalam pelaksanaan program *e-Government* yang efektif dan efisien, ketersediaan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik harus dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan *sharing information* / penyebaran informasi atau data dengan berbagai bidang dalam sebuah instansi pemerintah sehingga dapat menciptakan kesatuan sistem *e-Government* yang terintegrasi dengan baik. Ketersediaan perangkat elektronik yang terdapat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung khususnya di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dinilai cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan *e-Government*. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pegawai tetap Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA serta pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA yang menyampaikan bahwa jumlah kuantitas perangkat elektronik yang telah tersedia sudah dapat mencukupi dari seluruh kebutuhan yang telah direncanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung khususnya di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk dapat melaksanakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Pemenuhan kebutuhan jumlah perangkat elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* dinilai sangat penting karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Dengan jumlah perangkat elektronik yang dinilai sudah memadai dari segi kuantitasnya, maka hal ini pun akan berpengaruh terhadap tingkat kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung kepada masyarakat Kota Bandung sebagai pengguna aplikasi BIMMA dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* tersebut.

Sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang tersedia untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung khususnya di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* telah tersedia tiga macam bentuk perangkat elektronik yaitu komputer, *laptop*, dan *netbook*. Untuk setiap komputer, *laptop*, dan *netbook* yang telah tersedia, terdapat beberapa spesifikasi yang berbeda-beda antara perangkat elektronik yang satu dengan perangkat elektronik yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari para pegawai untuk dapat mengelola aplikasi BIMMA. Berikut di bawah ini beberapa sarana dan prasarana perangkat elektronik serta spesifikasi dari perangkat elektronik komputer, *laptop*, dan *netbook* yang telah tersedia di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Perangkat Elektronik dan Spesifikasi Perangkat Elektronik dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA

No	Nama Unit	Processor	RAM	Harddisk	VG A	Monitor	Jumlah
1.	Komputer	Core i3	4GB	500GB	2GB	16 inch	4 unit
2.	Komputer	Core i5	6GB	1TB	4GB	16 inch	2 unit
3.	Laptop	QuadCore	8GB	1TB	4GB	15,6 inch	2 unit
4.	Netbook	Intel Celeron	4GB	500GB	4GB	11,6 inch	2 unit
Jumlah							10 unit

(Sumber: Data dari Pegawai Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA Tahun 2020)

Sarana dan prasarana lainnya yang tersedia tidak hanya terdiri dari sekedar perangkat elektronik komputer *desktop*, tetapi juga tersedia sarana dan prasarana perangkat elektronik dengan jenis lainnya yaitu seperti *laptop* dan *netbook*. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pegawai tetap Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA serta pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA menyampaikan bahwa dengan adanya *laptop* dan *netbook* tersebut dapat menunjang peningkatan fleksibilitas kerja bagi para pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA dimanapun dan kapanpun tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Lebih dari itu, komputer, *laptop* dan *netbook* yang telah tersedia tidak hanya berfungsi sebagai komputer untuk menjalankan tugas perkantoran saja tetapi terdapat pula komputer, *laptop* dan *netbook* yang tersedia dan berfungsi sebagai *server*, baik itu *server* untuk aplikasi BIMMA maupun untuk *server* jaringan.

Terdapat juga sarana dan prasarana lainnya yang telah tersedia untuk dapat membuat pelayanan bursa kerja *online* berjalan semakin efektif dan efisien, yaitu dengan tersedianya sarana dan prasarana peralatan penunjang *hardware* seperti *printer* dan *scanner*. Sarana dan prasarana *scanner* mempunyai fungsi sebagai pengganda berkas untuk kemudian dikonversi dan disimpan dalam bentuk digital ke perangkat elektronik, sementara sarana dan prasarana *printer* mempunyai fungsi sebagai pencetak berkas dari data digital yang ada di perangkat elektronik ke dalam bentuk *hardfile*. Berikut di bawah ini sarana dan prasarana perangkat keras serta spesifikasi dari perangkat keras *printer* dan *scanner* yang telah tersedia di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana Perangkat Keras dan Spesifikasi Perangkat Keras dalam Penyelenggaraan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA

No	Nama Unit	Merk	Jenis	Resolusi	Dimensi	Ukuran Tinta	Jenis Cetakan
1.	Printer	Canon	iP2770	4800 x 1200dpi	445 x 250 x 130mm	2pl	A4, Letter, Legal, A5, B5, Amplop
2.	Scanner	Epson	DS-410	LED RGB:600 x 600 dpi	11.7" x 6" x 6.1" (W x D x H)	-	JPEG, TIFF, Multi-TIFF, PDF, PNG

(Sumber: Data dari Pegawai Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA Tahun 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pegawai tetap Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA menjelaskan bahwa peralatan penunjang seperti *printer* dan *scanner* ini sangat dibutuhkan karena dalam kegiatan administratif untuk pelaksanaan bursa kerja *online* masih terdapat beberapa dokumen dari pengguna yang harus untuk dicetak dan diambil secara langsung atau luar jaringan ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, sehingga menurut pandangan peneliti dengan adanya *printer* dan *scanner* yang telah tersedia di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan membuat pelayanan publik yang dilakukan semakin efektif dan efisien.

Kebutuhan sarana dan prasarana lainnya juga dipertegas oleh pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA dalam hasil wawancaranya yang menyampaikan bahwa dalam proses penggunaan sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia, terdapat juga sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang penting untuk dapat dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online*, hal ini dikarenakan sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi tersebut dapat menghubungkan jaringan komunikasi antara satu jaringan komputer ke beragam tipe jaringan komputer yang lainnya, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah jaringan internet. Jaringan internet ini menjadi sarana konektivitas komunikasi secara *realtime* yang menghubungkan antara satu perangkat elektronik dengan perangkat elektronik lainnya. Sehingga, untuk dapat menjalankan suatu konektivitas komunikasi secara *realtime* tersebut pada komputer, *laptop*, dan *netbook* yang telah tersedia, maka diperlukan suatu jaringan internet untuk dapat meningkatkan interaktivitas bagi para pegawai dalam memberikan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

Dalam menyelenggarakan program *e-Government*, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah terfasilitasi dengan jaringan internet yang cukup baik dalam mengelola layanan bursa kerja *online*. Menurut pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang

mengelola aplikasi BIMMA menyatakan bahwa telah terdapat jaringan internet dengan kecepatan internet yang dimiliki sampai dengan 100-150 Mbps dan jumlah perangkat yang bisa terkoneksi jaringan internet tersebut mencapai 12-18 perangkat. Oleh karena itu, dengan tersedianya jaringan internet dengan kecepatan internet yang memadai tersebut dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan perusahaan, pemerintah dengan pegawai serta pemerintah satu dengan pemerintah lainnya dalam mengoperasikan layanan di aplikasi BIMMA.

Kebutuhan sarana dan prasarana lainnya yang cukup menjadi perhatian khusus oleh para pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aplikasi BIMMA yaitu tentang permasalahan mengenai kebutuhan suatu sarana dan prasarana yang sampai saat ini belum tersedia walaupun sarana dan prasarana tersebut cukup dibutuhkan. Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pegawai tetap Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA serta pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA menyampaikan bahwa sarana dan prasarana yang belum tersedia walaupun sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan ialah *generator set* (genset). *Generator set* (genset) ini sangat dibutuhkan karena jika terjadi pemadaman listrik, maka aplikasi BIMMA akan mengalami gangguan. Hal ini dikarenakan pemadaman listrik atau *power outage* menjadi penyebab suatu aplikasi atau *webiste* mengalami kegagalan sistem. Sebab, ketika *data center* mengalami gangguan dan *server* mati, tentu saja aplikasi atau *website* juga mengalami dampaknya. Maka dari itu, untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan sistem pada aplikasi BIMMA, maka pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung membutuhkan suatu *generator set* (genset) untuk dapat mengatasi permasalahan-permasalahan kegagalan sistem pada aplikasi BIMMA saat pemadaman listrik atau *power outage*.

Dampak dari pemadaman listrik atau *power outage* juga berpengaruh bagi pengelolaan aplikasi BIMMA, dampak dari hal ini juga tertera dalam kolom *feedback* di *Google Play* yang menunjukkan terdapatnya pengguna aplikasi BIMMA yang mengeluhkan adanya sistem yang *error* pada aplikasi BIMMA seperti data yang tidak dapat terinput dalam sistem, tidak bisa melakukan pelamaran kerja secara *online* dan lain sebagainya. Berikut beberapa komentar yang tertera di kolom *feedback* di *Google Play* terkait dengan permasalahan dalam mengakses aplikasi BIMMA.

Menurut Tim Pengelola Aplikasi BIMMA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa permasalahan tersebut terjadi karena terdapatnya kegagalan sistem dalam pengelolaan aplikasi BIMMA yang diakibatkan dari adanya pemadaman listrik atau

power outage yang terjadi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Sehingga, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung membutuhkan suatu *generator set* (genset) untuk mengurangi permasalahan kegagalan sistem pada aplikasi BIMMA tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat Kota Bandung sebagai pengguna aplikasi BIMMA. Namun, menurut Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pegawai di Bidang Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa belum tersedianya sarana dan prasarana *generator set* (genset) dikarenakan faktor sumber daya finansial yang belum menerima mengenai pengajuan pengadaan sarana dan prasarana *generator set* (genset) tersebut, hal ini dikarenakan terdapat penyesuaian anggaran akibat pandemi *covid-19* serta masih terdapatnya pengalokasian anggaran yang lebih diprioritaskan daripada pemenuhan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana *generator set* (genset) tersebut.

Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan serta berdasarkan triangulasi sumber dari beberapa data yang peneliti peroleh, peneliti mendapatkan kesamaan perspektif antara pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung serta Tim Pengembang Aplikasi BIMMA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menilai kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang tersedia untuk penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Dengan merujuk kepada pendapat (Ardipandanto et al. 2015:3) yang menyatakan bahwa “pertumbuhan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di suatu daerah berpengaruh secara signifikan terhadap berbagai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di segala bidang termasuk diantaranya bidang pelayanan publik”. Dengan demikian berdasarkan rujukan tersebut dapat diketahui bahwa kuantitas infrastruktur mempunyai peran yang cukup penting dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* tersebut, dan dapat diketahui pula bahwa kuantitas infrastruktur dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA sudah dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dari ditegaskannya pendapat dari pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung serta Tim Pengembang Aplikasi BIMMA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang menyatakan bahwa kuantitas sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang tersedia untuk penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA sudah memadai dari segi jumlahnya dan sudah memenuhi kebutuhan. Sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi tersebut yang dimaksud mencakupi perangkat elektronik yang telah tersedia sesuai dengan kebutuhan, perangkat keras yang telah tersedia sesuai dengan kebutuhan, dan jaringan internet yang telah tersedia sesuai dengan kebutuhan. Namun,

dari semua sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia tersebut, terdapat satu sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang belum tersedia hingga saat ini walaupun hal tersebut dianggap penting, sarana dan prasarana tersebut ialah *generator set* (genset).

4.1.2 Kualitas Infrastruktur Telekomunikasi yang Tersedia

Infrastruktur telekomunikasi yang baik tidak hanya dinilai dari segi kuantitasnya saja, tetapi juga penting untuk menilai sejauh mana kualitas dari sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia tersebut. Hal ini dikarenakan jika sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia ternyata tidak mempunyai kualitas yang memadai, maka sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi tersebut akan menjadi suatu hambatan tersendiri dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA karena tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang telah direncanakan. Sehingga, penting untuk dianalisis juga mengenai kualitas dari sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa dari semua sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA sudah cukup memadai dari segi kualitasnya, karena semua kebutuhan untuk mengelola pelayanan bursa kerja *online* sudah dapat dilakukan dengan baik dengan semua sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan hal yang disampaikan oleh pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA yang menyampaikan bahwa semua komputer, *laptop*, dan *netbook* yang telah tersedia tersebut sudah mempunyai umur pemakaian yang cukup lama, keberadaan sarana dan prasarana perangkat elektronik tersebut telah tersedia sejak tahun 2016, hingga sampai pada tahun 2020 belum terdapat sarana dan prasarana perangkat elektronik keluaran terbaru di setiap sarana dan prasarana yang tersedia. Sehingga, hal ini akan berakibat terhadap pembaharuan *software* yang dimiliki pada setiap komputer, *laptop*, dan *netbook* yang telah tersedia di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung khususnya pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Pembaharuan *software* yang dimiliki pada setiap komputer, *laptop*, dan *netbook* yang telah tersedia tersebut sangat penting untuk proses adaptasi pegawai dalam mengenal perkembangan teknologi, sehingga ini juga menjadi suatu permasalahan walaupun permasalahan ini bukan menjadi permasalahan besar terhadap penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Sehingga, penulis

berpendapat bahwa walaupun semua kebutuhan untuk mengelola pelayanan bursa kerja *online* sudah dapat dilakukan dengan baik karena kualitas dari sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia juga sudah cukup baik, tetapi tetap dibutuhkan suatu sarana dan prasarana dengan model keluaran yang terbaru agar dapat melakukan pembaharuan *software* yang dapat berdampak terhadap kualitas dari sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

Selain itu, kualitas untuk perangkat keras lainnya seperti *printer* dan *scanner* juga dinilai mempunyai kualitas yang baik untuk dapat membantu pekerjaan bagi para pegawai, hal ini disampaikan oleh pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota yang mengelola aplikasi BIMMA dan pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA. Dengan adanya sarana dan prasarana seperti *printer* dan *scanner* ini dapat membantu proses pencetakan data serta menggandakan data dalam bentuk digital dengan hasil yang terbaik. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pegawai tetap Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA menjelaskan bahwa peralatan penunjang seperti *printer* dan *scanner* ini mempunyai peran penting dalam kegiatan administratif untuk pelaksanaan bursa kerja *online* karena masih terdapat beberapa dokumen atau data dari pengguna yang harus untuk dicetak dan diambil secara langsung atau luring (luar jaringan) ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, sehingga berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak yang berkaitan tersebut dapat diketahui bahwa perangkat keras yang tersedia seperti *printer* dan *scanner* ini mempunyai kualitas yang memadai dan sesuai dengan kebutuhannya.

Kemudian, sarana dan prasarana lainnya yang telah tersedia yang dinilai cukup penting karena sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi tersebut dapat menghubungkan jaringan komunikasi antara satu jaringan komputer ke beragam tipe jaringan komputer yang lainnya atau yang disebut dengan jaringan internet ini juga penting untuk dianalisis kualitasnya. Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota yang mengelola aplikasi BIMMA dan pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA menyampaikan bahwa koneksi internet yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ini di setiap bagiannya memiliki kecepatan internet sampai dengan 100-150 Mbps dengan jumlah perangkat yang bisa terkoneksi jaringan internet tersebut mencapai 12-18 perangkat dapat dinilai sudah cukup baik, karena jaringan internet yang ada sudah dapat mengakomodasi kebutuhan pekerjaan dari setiap bagiannya secara optimal tanpa mengalami hambatan jaringan dan kecepatan akses internet tersebut.

Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan serta berdasarkan triangulasi sumber dari beberapa data yang peneliti peroleh, peneliti mendapatkan kesamaan perspektif antara pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota yang mengelola aplikasi BIMMA serta Tim Pengembang Aplikasi BIMMA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menilai kualitas perangkat keras seperti *printer* dan *scanner* dan menilai kualitas jaringan internet sebagai suatu sarana dan prasarana yang tersedia untuk penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Dengan merujuk kepada pendapat (Ardipandanto et al. 2015:3) yang menyatakan bahwa “penggunaan TIK dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi, terutama bila dihadapkan pada tantangan jarak dan kecepatan waktu penyelesaian masalah. Jaminan kerahasiaannya diawali dengan ketepatan”. Dengan demikian, berdasarkan rujukan tersebut dapat diketahui bahwa kualitas infrastruktur dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* tersebut, dan dapat diketahui pula bahwa kualitas infrastruktur dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA sudah dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dari ditegaskannya pendapat dari pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang menyatakan bahwa kualitas perangkat keras seperti *printer* dan *scanner* dan kualitas jaringan internet yang tersedia untuk penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA sudah sangat memadai dari segi kualitasnya dan sudah dapat memenuhi kebutuhan. Namun, terdapat perbedaan perspektif antara pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA serta Tim Pengembang Aplikasi BIMMA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menilai kualitas perangkat elektronik. Pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA menyampaikan bahwa kualitas dari perangkat elektronik yang tersedia sudah cukup memadai karena hampir semua kebutuhan untuk mengelola pelayanan bursa kerja *online* sudah dapat dilakukan dengan baik dengan semua kualitas sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia, namun hal ini berbeda dari apa yang disampaikan oleh pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang menyampaikan bahwa usia penggunaan perangkat elektronik tersebut sudah cukup tua, sehingga dibutuhkan suatu pembaharuan perangkat elektronik agar dapat melakukan pembaharuan pada *software* komputer, dan juga sebagai proses adaptasi pegawai dalam mengikuti perkembangan teknologi. Dengan terdapatnya perbedaan pendapat tersebut maka dapat diketahui oleh peneliti bahwa masih terdapat kualitas infrastruktur

telekomunikasi yang masih belum baik. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung perlu untuk melakukan evaluasi secara berkala dan perlu untuk meningkatkan kembali kualitas dari infrastruktur telekomunikasi yang telah tersedia untuk dapat menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* secara efektif dan efisien agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Dengan merujuk kepada pendapat Indrajit (2007:7-8) yang menyatakan bahwa “dalam level pelaksanaannya, perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur akan menjadi faktor teramat sangat penting dalam penerapan *e-Government*. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang dapat menunjang target atau prioritas pengembangan *e-Government* seperti yang telah disepakati”. Dengan demikian, pada faktor infrastruktur telekomunikasi ini, maka dapat diketahui bahwa faktor infrastruktur telekomunikasi yang disediakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dinilai sudah siap dalam menyelenggarakan program *e-Government*, namun tetap dibutuhkan peningkatan faktor infrastruktur telekomunikasi dari segi kuantitas maupun kualitasnya agar penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA dapat berjalan secara efektif dan efisien.

4.2 Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI oleh Pemerintah

Tingkat konektivitas dan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah merupakan suatu cara tentang bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan dan merawat secara maksimal terhadap suatu sarana dan prasarana teknologi yang telah tersedia untuk dapat membantu pekerjaan rutinitas pemerintah sehari-hari dalam melaksanakan suatu program *e-Government*. Pemanfaatan dan perawatan sarana dan prasarana teknologi merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah demi tercapainya pelaksanaan *e-Government* yang efektif dan efisien. Sarana dan prasarana teknologi tersebut menjadi alat utama dalam pelaksanaan *e-Government*, sehingga semakin baik pemanfaatan dan perawatan terhadap suatu sarana dan prasarana tersebut, maka akan semakin baik pula pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat.

Pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan sebelumnya tentang bagaimana *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam melakukan pemanfaatan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana yang telah tersedia, serta mengetahui apakah terdapat bantuan dana atau perangkat keras dari pihak lain. Analisis terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui tentang sejauh mana Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat memanfaatkan

seluruh sarana dan prasarana yang tersedia, apakah sarana dan prasarana yang tersedia tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik secara keseluruhan atau bahkan terdapat sarana dan prasarana yang tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, sehingga hal ini akan berdampak terhadap pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam hal ketenagakerjaan seperti memberikan informasi lowongan pekerjaan yang dapat diakses setiap waktu serta dapat melakukan pelamaran kerja secara *online* yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.

4.2.1 Bantuan Dana dan Perangkat Keras dari Pihak Lain

Dalam menyelenggarakan program *e-Government* biasanya terjadi keterlibatan dari beberapa pihak untuk membantu dalam segi bantuan keuangan atau membantu dari segi bantuan ketersediaan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan penyelenggaraan program *e-Government* di instansi pemerintah tersebut. Namun, memang tidak semua instansi pemerintah menerima bentuk bantuan tersebut dalam penyelenggaraan program *e-Government*, karena biasanya untuk kebutuhan dari segi keuangan dan segi sarana dan prasarana sudah tersedia dari sumber keuangan instansi pemerintah itu sendiri.

Pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan sebelumnya tentang bantuan dana dan perangkat keras dari pihak lain. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA serta Tim Pengembang Aplikasi BIMMA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tidak mendapatkan bantuan dana ataupun bantuan sarana dan prasarana dari pihak lain. Segala bentuk bantuan keuangan dan bantuan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung keberlangsungan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung bersumber dari APBD Kota Bandung.

Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan, dapat diketahui bahwa tidak terdapatnya bantuan dari segi keuangan dan segi sarana dan prasarana dari pihak lain. Dengan merujuk kepada pendapat Indrajit (2007:7-8) yang menyatakan bahwa “sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif *e-Government* yang akan diterapkan, membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya”. Dengan demikian, berdasarkan rujukan tersebut dapat diketahui pentingnya aspek keuangan dalam pelaksanaan program *e-Government* dan dapat diketahui pula bahwa semua bantuan keuangan

dan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung bersumber dari APBD Kota Bandung.

4.2.2 Pemanfaatan dan Perawatan Sarana dan Prasarana oleh Pegawai

Sebelum peneliti menjelaskan lebih lanjut tentang pemanfaatan terhadap sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang telah tersedia pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, peneliti akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana apa saja yang tersedia oleh Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pegawai tetap Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA serta pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA menyampaikan bahwa telah terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menjalankan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA, sarana dan prasarana tersebut antara lain tersedianya perangkat keras (*hardware*) serta perangkat lunak (*software*). Perangkat keras (*hardware*) yang tersedia antara lain adalah enam unit komputer, dua unit *laptop*, dua unit *netbook*, satu unit *printer*, satu unit *scanner*, serta *provider* jaringan internet. Sedangkan untuk perangkat lunak (*software*), dari setiap perangkat keras (*hardware*) yang tersedia memiliki sistem operasi komputer dengan jenis *Windows 8*, tersedia program aplikasi *Microsoft Office*, *Adobe Photoshop* dan beberapa aplikasi lainnya yang dibutuhkan, serta terdapat *antivirus* untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus virus yang terdapat pada perangkat keras komputer.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pegawai tetap dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA menjelaskan bahwa dalam melakukan pemanfaatan terhadap sarana dan prasarana yang telah tersedia, perangkat keras tersebut digunakan untuk melakukan beberapa kegiatan dalam pemanfaatan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA, pemanfaatan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA tersebut mencakup beberapa kegiatan, seperti melakukan penginputan data diri pengguna dalam melakukan pendaftaran diri pada aplikasi BIMMA, pembuatan kartu AK-1 untuk pengguna baru pada aplikasi BIMMA, penginputan informasi lowongan pekerjaan yang tersedia ke aplikasi BIMMA, memproses data pengguna yang melakukan lamaran *online* kepada perusahaan yang telah didaftarkan, pendataan perusahaan yang melakukan operasi bisnis di wilayah Kota Bandung, serta perangkat yang tersedia juga dijadikan sebagai suatu *server*, baik untuk *server*

aplikasi ataupun *server* jaringan.

Sarana dan prasarana perangkat elektornik dan perangkat keras yang telah tersedia dalam melakukan pelayanan bursa kerja *online* sudah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung khususnya pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hal tersebut dijelaskan oleh pihak pegawai tetap dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengelola pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA dan pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA yang menyatakan bahwa dari seluruh sarana dan prasarana perangkat elektronik dan perangkat keras yang telah tersedia tersebut sudah dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menjalankan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam mengelola pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Pemanfaatan mengenai sarana dan prasarana perangkat elektronik dan perangkat keras yang telah tersedia dalam pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA dijelaskan seperti di bawah ini.

Tabel 4.3 Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perangkat Elektronik dan Perangkat Keras dalam Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA

No.	Kegiatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Perangkat Elektronik dan Perangkat Keras	Jenis Perangkat Keras	Jumlah Perangkat Keras
1.	Penginputan data diri pengguna dalam melakukan pendaftaran diri	Komputer	1 unit
		Laptop	1 unit
2.	Pembuatan kartu AK-1 untuk pengguna baru	Komputer	1 unit
		Printer	1 unit
3.	Penginputan informasi lowongan pekerjaan yang tersedia ke aplikasi	Komputer	1 unit
4.	Memproses data pengguna yang melakukan lamaran <i>online</i> kepada perusahaan yang telah didaftarkan	Komputer	2 unit
		Scanner	1 unit
5.	Pendataan perusahaan yang melakukan operasi bisnis di wilayah Kota Bandung	Laptop	1 unit
		Netbook	2 unit
6.	Server aplikasi dan server jaringan	Komputer	1 unit

(Sumber: Diolah oleh Peneliti dari hasil wawancara pegawai Tim Pengembang Aplikasi BIMMA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2021)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana perangkat keras (*hardware*) yang tersedia terdiri dari komputer, *laptop*, dan *netbook* yang memiliki perangkat lunak (*software*) sistem operasi komputer dengan jenis *Windows 8*, dan tersedia program aplikasi *Microsoft Office*, *Adobe Photoshop* dan beberapa aplikasi lainnya yang dibutuhkan, serta terdapat *antivirus* untuk mencegah, mendeteksi, dan menghapus virus yang terdapat pada perangkat keras tersebut telah dimanfaatkan dengan baik dalam mengelola pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Sarana dan prasarana tersebut telah dimanfaatkan dengan baik

karena setiap perangkat keras yang tersedia telah ditentukan pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhannya, sehingga pemanfaatan antara perangkat keras satu dengan perangkat keras yang lainnya tidak ada yang saling tumpang tindih pemanfaatannya dalam proses kegunaannya karena telah dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah direncanakan.

Tindakan pemanfaatan terhadap sarana dan prasarana perangkat elektornik dan perangkat keras yang telah tersedia tidak menjadi satu-satunya hal yang dianggap penting untuk melakukan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA, tetapi menurut pihak pegawai tetap dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengelola aplikasi BIMMA dan pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA menyampaikan bahwa tindakan perawatan juga dibutuhkan sebagai suatu tindakan agar sarana dan prasarana perangkat elektornik dan perangkat keras yang tersedia tersebut dapat terhindar dari kerusakan, terhindar dari bahaya yang disebabkan kegagalan sistem komputer, serta kegunaan komputer yang dapat digunakan dalam waktu yang lama sehingga bisa menghemat pengeluaran biaya. Fungsi teknologi informasi sangat ditentukan oleh perangkat yang digunakan yaitu, perangkat elektornik dan perangkat keras. Perangkat elektornik dan perangkat keras lainnya yang terawat akan memberikan peluang yang lebih besar terhadap fungsi pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu para pegawai Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menyelesaikan tugasnya sehari-hari. Oleh karena itu, ketersediaan tindakan rutin yang dijalankan oleh Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam merawat dan memperbaiki sarana dan prasarana perangkat elektornik dan perangkat keras yang telah tersedia sangat diperlukan untuk menjaga kesiapan perangkat elektornik dan perangkat keras tersebut untuk dapat menjalankan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pegawai tetap dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengelola aplikasi BIMMA dan pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA menyatakan bahwa terdapat beberapa tindakan rutin yang dilakukan dalam melakukan perawatan sarana dan prasarana perangkat elektornik dan perangkat keras yang tersedia, beberapa hal yang dilakukan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Perawatan Sarana dan Prasarana Perangkat Elektronik dalam Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA

No.	Kegiatan Perawatan Sarana dan Prasarana Perangkat Elektronik	Jenis Perangkat Keras	Durasi Waktu Kegiatan
1.	Membersihkan kotoran debu di sekitar komputer untuk mengurangi kerusakan pada <i>airflow</i> dari sistem pendingin komputer	Komputer	1 kali/3 hari
		Netbook	1 kali/3 hari

No.	Kegiatan Perawatan Sarana dan Prasarana Perangkat Elektronik	Jenis Perangkat Keras	Durasi Waktu Kegiatan
2.	Melakukan <i>defrag harddisk</i> pada komputer untuk mengurutkan data <i>harddisk</i> berdasarkan jenisnya sehingga akan mempermudah proses <i>read/write</i> yang menyebabkan beban kerja komputer akan lebih ringan	Laptop	1 kali/3 hari
		Komputer	1 kali/hari
		Netbook	1 kali/hari
3.	Melakukan pemindaian virus secara berkala untuk menghindari adanya virus dalam komputer	Laptop	1 kali/hari
		Komputer	1 kali/hari
		Netbook	1 kali/hari
4.	Menempatkan CPU (<i>central processing unit</i>) dan monitor di tempat yang mempunyai ventilasi udara yang cukup luas dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya kondisi panas yang berlebihan	Komputer	Setiap saat
		Netbook	Setiap saat
		Laptop	Setiap saat
5.	Menghapus program-program yang tidak dibutuhkan dengan tujuan untuk menjaga kapasitas dari RAM komputer	Komputer	Tentatif
		Netbook	Tentatif
		Laptop	Tentatif
6.	Menggunakan <i>stapolt</i> untuk mengantisipasi naik turunnya tegangan listrik	Komputer	Setiap saat
		Netbook	Setiap saat
		Laptop	Setiap saat

(Sumber: Diolah oleh Peneliti dari hasil wawancara dengan Pegawai Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA dan pegawai Tim Pengembang Aplikasi BIMMA Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2021)

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa tindakan tersebut dilakukan secara rutin oleh pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA dan pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA dalam melakukan perawatan sarana dan prasarana yang telah tersedia. Menurut pandangan peneliti tindakan tersebut secara rutin dilakukan karena tindakan tersebut merupakan tindakan preventif yang dinilai paling efektif dan efisien untuk dilakukan secara rutin agar dapat mengurangi resiko-resiko kerusakan yang terjadi pada sarana dan prasarana perangkat elektronik yang telah tersedia untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam melakukan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

Dengan melakukan tindakan yang dapat mengurangi resiko-resiko kerusakan pada sarana dan prasarana perangkat keras tersebut, maka hal ini dapat pula menjadi suatu tindakan yang dapat mengantisipasi terjadinya pengeluaran keuangan dan kebutuhan teknis lainnya yang mendadak atas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perangkat keras yang membutuhkan perbaikan saat sarana dan prasarana tersebut mengalami kerusakan.

Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan serta berdasarkan triangulasi sumber dari beberapa data yang peneliti peroleh, dapat diketahui bahwa pada faktor tingkat konektivitas dan penggunaan teknologi informasi oleh pegawai dapat dinilai bahwa pegawai sudah dapat melakukan pemanfaatan terhadap sarana dan prasana yang telah tersedia dengan baik, serta para pegawai juga sudah dapat melakukan perawatan terhadap sarana dan prasarana secara berkala dengan baik pula. Dengan merujuk kepada pendapat Indrajit (2007:7-8) yang menyatakan bahwa “dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan beraneka ragam teknologi informasi dalam membantu kegiatan sehari-hari akan memperlihatkan sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan konsep *e-Government*”. Dengan demikian pada aspek tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah dapat dinilai bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah siap dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA karena Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah dapat melakukan pemanfaatan dan perawatan terhadap sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi dengan baik.

4.3 Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemerintah

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen penting dalam suatu instansi pemerintah yang akan bergerak dan melakukan suatu aktivitas demi mencapai suatu tujuan bersama. Keberhasilan suatu instansi pemerintah ditentukan dari kapabilitas pegawai yang berada di instansi pemerintah tersebut. Kapabilitas sumber daya manusia yang berorientasi pada pengetahuan dan keterampilan akan menentukan keberhasilan seorang pegawai dalam menyelesaikan suatu tanggungjawab yang dibebankan kepadanya secara baik. Masalah sumber daya manusia menjadi sorotan dan tumpuan penting bagi instansi pemerintah untuk tetap beradaptasi di era perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sehingga, sumber daya manusia mempunyai peran utama dalam kegiatan instansi pemerintah. Walaupun instansi pemerintah didukung dengan sarana dan prasarana serta sumber daya finansial yang mencukupi dan memadai, tetapi tanpa dukungan sumber daya manusia yang andal maka tanggungjawab instansi pemerintah tersebut tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci utama yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya, termasuk

juga dalam mengimplementasikan program *e-Government*.

Dalam mengimplementasikan suatu program *e-Government* tentu memerlukan dukungan terhadap pegawai yang profesional, pegawai yang mempunyai kinerja yang tinggi, pegawai yang memiliki kemampuan yang memadai, pegawai yang mendapatkan pelatihan yang cukup, serta pegawai yang memiliki keterampilan yang berkualitas. Dengan kata lain, setiap instansi pemerintah harus dapat mewujudkan prinsip dasar dari *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui implementasi program *e-Government* yang dipengaruhi dengan keberadaan pegawai yang tersedia. Pengimplementasian program *e-Government* juga akan mendorong para pegawai untuk meningkatkan kualitasnya agar tidak tertinggal dalam penguasaan ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Artinya, terdapat suatu hal yang sangat berkorelasi antara implementasi suatu program *e-Government* dengan kualitas serta kinerja bagi para pegawai pada instansi pemerintah. Hal ini selaras dengan salah satu konsep *e-Government*, yaitu “*government to employees*”.

Pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan sebelumnya tentang bagaimana *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam aspek kesiapan dari segi sumber daya manusia pegawai dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Untuk lebih jelasnya mengenai masing-masing aspek dari faktor kesiapan SDM di pemerintah dapat dilihat dari dari penjelasan di bawah ini.

4.3.1 Kualitas Pegawai dalam Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu tolak ukur dalam menentukan apakah pegawai tersebut sudah siap atau belum siap untuk dapat melakukan suatu tugas atau tanggungjawab tertentu, salah satunya ialah mengolah dan mengoperasikan suatu sistem pelayanan berbasis *online*. Untuk menjalankan program *e-Government*, instansi pemerintah harus memastikan kesiapan dari kualitas para pegawainya untuk dapat bertransformasi dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sebelumnya bersifat manual menjadi melakukan pekerjaan yang dikolaborasikan dengan penggunaan-penggunaan teknologi dan informasi. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan mempengaruhi keberhasilan dari program *e-Government* yang telah ditargetkan dalam suatu perencanaan. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung perlu untuk mempersiapkan kualitas SDM dari para pegawainya untuk dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyatakan bahwa strategi yang dilakukan sebagai

pimpinan dalam bidang tersebut dalam membantu para pegawainya untuk dapat beradaptasi dan meningkatkan kualitasnya dalam melaksanakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA ini ialah dengan menyediakan kesempatan pelatihan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelatihan tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan tingkat kompetensi pegawai dalam bidang teknologi informasi untuk mengelola aplikasi BIMMA. Selain itu, terdapat pelaksanaan sosialisasi secara berkala dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dibantu oleh Tim Pengembang Aplikasi BIMMA kepada seluruh pegawai Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk dapat mensosialisasikan dan mendiskusikan terkait dengan pembaharuan fitur-fitur layanan pada aplikasi BIMMA serta penjelasan fungsi dari setiap fitur-fitur layanan yang tersedia tersebut.

Pernyataan di atas pun sesuai dengan yang disampaikan oleh Staff Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA yang menyampaikan bahwa selaku pegawai mereka telah mendapatkan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan sistem pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Selain itu, pihak Staff Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA juga menyampaikan bahwa selain dari pelatihan dan sosialisasi, terdapat juga cara efektif yang dirasa bermanfaat dalam proses memahami sistem tersebut saat pekerjaan sedang berlangsung yaitu dengan cara berbagi informasi dan pengetahuan saat sedang melaksanakan pekerjaan atau yang biasanya disebut dengan "*learning by doing*". Para pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA beranggapan bahwa dengan saling membantu ketika pekerjaan berlangsung itu lebih memudahkan mereka untuk memahami bagaimana cara mengoperasikan sistem dan mengatasi apabila terjadi kesalahan dari sistem itu sendiri.

Terdapat beberapa faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dari seorang pegawai dalam menyelenggarakan program *e-Government*, faktor-faktor tersebut ialah faktor usia dan faktor latar belakang pendidikan dari pegawai yang bersangkutan tersebut. Pihak Staff Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA menyatakan bahwa faktor usia dan faktor latar belakang pendidikan mempunyai peran penting dalam melakukan proses adaptasi untuk menyelenggarakan program *e-Government*. Berikut ini peneliti memaparkan mengenai keterangan usia dan keterangan latar belakang pendidikan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

Tabel 4.5 Keterangan Usia dan Latar Belakang Pendidikan Pihak Pegawai yang Mengelola Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA

No.	Jabatan	Informan	Usia	Latar Belakang Pendidikan
1.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Informan 3	55	S2
2.	Pengantar Kerja Muda	Informan 2	57	S1
3.	Pengolah Bahan Perencanaan Tenaga Kerja	Informan 6	46	S1
4.	Pengantar Kerja Pratama	Informan 5	53	D3

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, 2020)

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan usia dan latar belakang pendidikan terhadap pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Berdasarkan data yang diolah oleh peneliti dengan membandingkan dengan hasil wawancara, maka peneliti berpendapat bahwa faktor usia dan faktor latar belakang pendidikan tersebut dapat mempengaruhi kualitas kinerja dari para pegawai dalam untuk menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Peneliti menemukan penemuan dari hasil penelitian yang menggambarkan kesiapan para pegawai dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA, seperti yang dirasakan oleh pegawai Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan jabatan sebagai Pengolah Bahan Perencanaan Tenaga Kerja yang mempunyai usia yang lebih muda dari pihak yang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA, pihak tersebut menyatakan bahwa dalam menjalankan perubahan tersebut mengalami proses adaptasi yang lebih mudah dalam mengelola sistem berbasis elektronik karena mempunyai latar belakang yang pendidikan yang relevan dengan teknologi serta karena usia yang masih tergolong muda sehingga proses adaptasi yang dilakukan dapat dilakukan dengan jauh lebih mudah, tidak jauh berbeda dengan pegawai Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan jabatan sebagai Pengantar Kerja Pratama yang menyampaikan bahwa pegawai tersebut dapat menerima perubahan sistem kerja ini dengan baik meskipun pada awal pelaksanaannya masih sedikit mengalami hambatan dan tantangan tersendiri, namun dengan seiring berjalannya waktu, proses adaptasi tersebut dapat dilalui dengan baik. Terdapat perbedaan pandangan dari pegawai Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan jabatan Pengantar Kerja Muda menyatakan bahwa untuk dapat melakukan proses adaptasi pada sistem *online* seperti ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena faktor usia yang sudah cukup tua dan latar belakang pendidikan yang tidak relevan terhadap teknologi membuat proses adaptasi ini mengalami kesulitan yang

cukup signifikan, proses adaptasi ini dilakukan harus dengan sungguh-sungguh karena sangat berkaitan dengan pemberian pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai pengguna aplikasi BIMMA. Untuk pihak Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sendiri memegang peran sebagai *top level management* yang menggunakan fungsi *controlling* nya untuk dapat mengawasi setiap kinerja pegawainya.

Peneliti pun juga mendapatkan pernyataan dari pegawai Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA selaku pihak yang mengoperasikan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA yang menyampaikan bahwa pada saat di tahun 2020 pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengoperasian aplikasi BIMMA sudah dapat mengoperasikannya dengan baik. Peneliti juga melakukan pemeriksaan silang kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan mendapatkan jawaban yang sama bahwa memang dari hasil pengawasannya menyampaikan bahwa semua pegawainya sudah dapat memahami dan mengoperasikan sistem pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA dengan baik. Meskipun memang dalam melakukan pengelolaan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA masih terdapat kekurangan kemampuan dan keterampilan pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan, sehingga masih dibutuhkannya pihak ketiga dalam mengatasi permasalahan dalam pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA tersebut.

Oleh karena itu, dalam melakukan pengelolaan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA terdapat dua pihak yang saling terlibat untuk melakukan tugas tersebut, pihak-pihak yang terlibat tersebut ialah pihak pegawai dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA sebagai pihak pertama dan pihak pegawai dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA sebagai pihak ketiga. Dalam melakukan tugas untuk mengelola aplikasi BIMMA tersebut terdapat pegawai tetap dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang melaksanakan tugas tersebut secara rutin, namun dalam menjalankan tugas tersebut terdapat keterlibatan dari pihak pegawai dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA. Sehingga, pengimplementasian tugas antara pihak pegawai dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mempunyai tugas untuk mengelola aplikasi BIMMA dan pihak pegawai dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA memiliki tumpang tindih tanggungjawab antara yang satu dengan yang lainnya. Keterlibatan Tim Pengembang Aplikasi BIMMA sebagai pihak ketiga pada awalnya dimulai dari kontrak tugas untuk membuat aplikasi BIMMA pada tahun 2016 lalu, namun pada tahun 2020 pihak pegawai dari Tim

Pengembang Aplikasi BIMMA sebagai pihak ketiga tetap dilibatkan dalam menjalankan tugas yang sama seperti pegawai tetap dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk melakukan teknis pengelolaan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

Setelah peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada pihak Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, maka untuk permasalahan mengenai tumpang tindih tanggungjawab dalam menjalankan tugas memang menjadi permasalahan yang cukup krusial, karena pembagian tugas antara pegawai tetap dan pegawai kontrak menjadi tumpang tindih, sehingga membuat pekerjaan dari para pegawai menjadi tidak efektif karena kurangnya perencanaan SDM yang matang dalam pembagian tanggungjawab serta tugas dalam melakukan pengelolaan teknis aplikasi BIMMA tersebut. Namun, keterlibatan pihak pegawai dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA dalam tugas pengelolaan aplikasi BIMMA bukan serta merta karena kesengajaan dalam melakukan kesalahan, tetapi hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan seorang tenaga ahli dalam mengembangkan fitur layanan pada aplikasi BIMMA, yaitu karena terdapatnya pengembangan layanan *data center* (DC) dan *disaster recovery center* (DRC), *data center* (DC) adalah tempat *server* data utama disimpan sedangkan *disaster recovery center* (DRC) merupakan tempat *server* data cadangan disimpan yang dapat dioperasikan & digunakan apabila *server* utama sewaktu waktu mengalami gangguan akibat bencana alam, sehingga pihak ketiga dilibatkan dalam pengembangan layanan tersebut. Kemudian karena adanya peningkatan kualitas *server* pada aplikasi BIMMA, dengan terjadinya pandemi *Covid-19* membuat pengguna aplikasi BIMMA semakin meningkat karena semakin banyak masyarakat yang mencari lowongan pekerjaan akibat dari dampak pandemi *Covid-19* tetapi peningkatan pengguna aplikasi BIMMA tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas *server* yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sehingga para pegawai dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA dilibatkan kembali dalam pengembangan aplikasi BIMMA untuk dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan kualitas *server* yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Selanjutnya ialah karena adanya pengembangan fitur-fitur pada aplikasi BIMMA, karena cukup banyak kritikan dan masukan yang disampaikan dari para pengguna untuk dapat memperbaiki layanan di aplikasi BIMMA, sehingga diperlukan pengolahan informasi dan analisis data untuk pembaharuan layanan pada aplikasi BIMMA agar dapat meningkatkan kepuasan dari para pengguna aplikasi BIMMA. Oleh karena itu, keterlibatan dari para pegawai Tim Pengembang Aplikasi BIMMA dibutuhkan dalam proses

pembaharuan layanan-layanan pada aplikasi BIMMA tersebut.

Dalam proses penyelenggaraan tugas yang dilakukan oleh pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA dapat diketahui bahwa pekerjaan tersebut memang mempunyai sifat sebagai tugas yang tidak dilakukan secara rutin, karena pelaksanaannya dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Sehingga, dalam menjalankan suatu kontrak kerja, para pegawai dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA selain menjalankan tanggungjawab untuk pengembangan fitur layanan pada aplikasi BIMMA, para pegawai tersebut pun juga melakukan pengelolaan teknis pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA seperti yang dilakukan oleh pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, hal ini dapat terjadi karena masih terdapatnya kekurangan kemampuan khusus dalam keterampilan penggunaan teknologi informasi dari pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam melakukan pengelolaan teknis pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA, sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung memutuskan untuk tetap melibatkan pihak pegawai dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA sebagai pihak ketiga dalam melakukan teknis pengelolaan pelayanan bursa kerja *online* untuk dapat saling membantu dalam melakukan pekerjaan, tetapi menurut pandangan Kepala Bidang Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dari hasil wawancaranya menyampaikan bahwa perencanaan SDM dalam pengelolaan teknis pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA dinilai tidak berjalan efektif karena mengalami tumpang tindih tanggungjawab dan tugas antara pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan pegawai kontrak dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA.

Berdasarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan Tim Pengembang Aplikasi BIMMA yang telah dijelaskan di atas, hal ini sangat berkaitan dengan kemampuan khusus yang dimiliki oleh pegawai tetap di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung terhadap keterampilannya menggunakan teknologi informasi untuk melakukan pengelolaan teknis pada aplikasi BIMMA. Kemampuan keterampilan khusus tersebut berimplikasi terhadap pembekalan ilmu yang didapatkan oleh para pegawai tetap untuk dapat menerima pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang *softskill* ataupun *hardskill* bagi para pegawai dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi informasi untuk melakukan pengelolaan teknis pada aplikasi BIMMA. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pegawai tetap Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA menyampaikan bahwa

pelatihan khusus mengenai keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dilakukan secara rutin setiap tahun. Dalam satu tahun biasanya terdapat 2 (dua) kali pelaksanaan pelatihan bagi para pegawai yang berhubungan langsung dengan penggunaan teknologi informasi dalam mengelola aplikasi BIMMA. Namun, menurut pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa jumlah peminat bagi pihak yang membutuhkan pelatihan dalam penggunaan teknologi informasi sering sekali tidak dibarengi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi, sehingga pelaksanaan pelatihan masih sering sekali mengalami kendala dalam pengimplementasiannya karena masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana perangkat keras dalam pelaksanaan pelatihan tersebut. Oleh karena itu, dengan terjadinya kendala terhadap pelatihan-pelatihan keterampilan khusus kepada para pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA, maka hal ini juga berdampak terhadap hasil pekerjaan untuk melakukan pengelolaan teknis pada aplikasi BIMMA.

Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan serta berdasarkan triangulasi sumber dari beberapa data yang peneliti peroleh, peneliti berpendapat bahwa telah terdapat kemajuan yang baik dari aspek kualitas sumber daya manusia para pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, namun penting untuk diperhatikan pembagian tanggungjawab dan tugas yang jelas antara pihak pegawai dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA dan pihak pegawai dari Tim Pengembang Aplikasi BIMMA agar tidak terjadi tumpangtindih tanggungjawab. Selain itu, penting untuk diperhatikan juga mengenai kualitas pelatihan yang baik membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelatihan tersebut dapat membawa dampak yang baik untuk kualitas pegawai.

Dengan merujuk kepada pendapat (Ardipandanto et al. 2015:128) yang menyatakan bahwa “agar pengembangan TIK dapat dilakukan secara maksimal, maka perlu melakukan peningkatan kemampuan SDM untuk penggunaan sistem dan penguasaan sistem keamanan TIK”. Dengan demikian, berdasarkan rujukan tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan kemampuan SDM menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan pelayanan berbasis TIK dan aspek kualitas sumber daya manusia para pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah terdapat kemajuan yang baik.

4.3.2 Kuantitas Pegawai dalam Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online

Kuantitas sumber daya manusia pegawai dalam suatu instansi pemerintah dalam menjalankan

program *e-Government* harus dapat diperhatikan dengan baik, hal ini dikarenakan semakin terpenuhinya jumlah SDM pegawai sesuai dengan kebutuhannya, maka akan semakin cepat dan tepat pula suatu pekerjaan yang dilakukan oleh instansi tersebut dalam menyelesaikan suatu pekerjaannya. Kuantitas SDM pegawai harus dapat disesuaikan dengan beban kerja dari setiap pekerjaan yang ada, sehingga dapat mencapai pada titik efektif dan efisien antara kuantitas SDM pegawai dan beban kerja di setiap pekerjaannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa kuantitas SDM pegawai untuk mengelola pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA sudah mencukupi dari kebutuhan, namun ada beberapa pekerjaan lainnya yang menunjang pelayanan bursa kerja *online* yaitu tugas mencari lowongan pekerjaan. Untuk menjalankan tugas mencari lowongan pekerjaan ini jumlah kuantitas SDM nya dinilai masih kurang dan membutuhkan penambahan jumlah SDM pegawai. Hal ini juga selaras dengan apa yang diungkapkan oleh pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang menyatakan bahwa untuk jumlah pegawai yang mengelola pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA sudah cukup memadai, namun untuk menjalankan tugas mencari lowongan pekerjaan dinilai belum mencukupi jumlah SDM pegawai nya.

Dalam melakukan tugas untuk pencarian lowongan pekerjaan, pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung melakukan tugas dengan cara menghampiri setiap perusahaan yang telah terdaftar. Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, perusahaan yang telah terdaftar pada tahun 2020 berjumlah 4.656 perusahaan. Dengan jumlah perusahaan yang sangat banyak tersebut, terdapat 13 orang pegawai dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang bertanggungjawab dalam melakukan pencarian lowongan pekerjaan dari setiap perusahaan yang telah terdaftar. Namun, dalam pengoperasiannya dari sebanyak 13 orang pegawai yang tersedia, hanya terdapat sebanyak 6 orang pegawai saja melakukan pencarian lowongan pekerjaan dari setiap perusahaan yang telah terdaftar tersebut. Padahal informasi lowongan pekerjaan tersebut menjadi hal yang cukup penting dalam pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA karena hal ini dapat membantu masyarakat Kota Bandung dalam mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada para pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa terjadinya permasalahan terhadap kurangnya pemanfaatan jumlah pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam melakukan tugas untuk melakukan pencarian lowongan pekerjaan dilabelkan oleh beberapa faktor, yaitu terdapat ketimpangan antara peningkatan jumlah perusahaan yang terdaftar yang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah pegawai yang melakukan tugas untuk melakukan pencarian lowongan pekerjaan sehingga hal ini berkaitan dengan beban kerja yang semakin meningkat bagi para pegawai tetapi tidak dibarengi dengan bertambahnya jumlah SDM di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Sehingga, dengan terjadinya permasalahan seperti ini membuat para pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung khususnya pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengalami penurunan tingkat kinerja pegawai karena dipengaruhi oleh beban kerja yang tidak seimbang berdasarkan dari jumlah pegawai yang tersedia di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Lalu, untuk alasan selanjutnya yaitu terdapat prioritas pekerjaan lain yang tingkat kepentingannya lebih diprioritaskan untuk diselesaikan lebih dahulu dibandingkan dengan melakukan pencarian informasi lowongan pekerjaan. Lalu, alasan selanjutnya ialah keterbatasan mobilitas karena terdapat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kebijakan *Work From Home* (WFH) di Kota Bandung pada tahun 2020 untuk mengurangi mobilitas masyarakat Kota Bandung dalam mencegah penyebaran virus *Covid-19*, sehingga membuat pegawai dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mengalami penyesuaian dalam menjalankan tugasnya. Lalu, untuk alasan selanjutnya ialah terdapat perusahaan yang kurang kooperatif dalam menyampaikan lowongan pekerjaan, hal ini terbukti dari banyak perusahaan yang lebih memilih untuk menginformasikan lowongan pekerjaan ke aplikasi pencari kerja lainnya dibandingkan dengan aplikasi BIMMA dikarenakan lebih banyak SDM unggul yang melakukan pelamaran kerja berasal dari aplikasi pencari kerja lainnya dibandingkan melalui aplikasi BIMMA. Pada penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan mengenai pemanfaatan jumlah pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, sehingga dapat mengakibatkan hasil yang tidak maksimal dalam melakukan tugas untuk melakukan pencarian lowongan pekerjaan.

Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan serta berdasarkan triangulasi sumber dari beberapa data yang peneliti peroleh serta dengan merujuk kepada pendapat Indrajit (2007:7-8) yang menyatakan bahwa “yang akan menjadi” pemain utama” atau subyek di dalam inisiatif *e-Government* pada dasarnya adalah manusia yang bekerja di lembaga pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka akan sangat

mempengaruhi performa penerapan *e-Government*. Semakin tinggi tingkat *information technology literacy* SDM di pemerintah, semakin siap mereka dalam menerapkan konsep *e-Government*”, dapat diketahui bahwa faktor kesiapan SDM di pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dinilai masih belum siap. Hal ini dapat dibuktikan dari masih terjadinya tumpang tindih tanggungjawab dan tugas antara pegawai tetap dan pegawai kontrak sehingga hal ini dapat berdampak terhadap kualitas pengelolaan teknis data tenaga kerja pada aplikasi BIMMA, lalu kemudian masih terdapatnya kekurangan pemanfaatan kuantitas SDM dalam menjalankan tugas mencari pekerjaan yang mana tugas tersebut mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA yang bertujuan untuk menyediakan informasi pasar kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, hal tersebut dapat mengakibatkan *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA dapat dinilai belum siap.

4.4 Ketersediaan Dana dan Anggaran

Ketersediaan dana merupakan suatu jumlah anggaran atau jumlah uang ekstra yang dimiliki instansi pemerintah untuk digunakan sebagai belanja operasional pada suatu kurun waktu tertentu. Sedangkan, ketersediaan anggaran dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan dari instansi pemerintah tertentu untuk suatu periode dimasa yang akan datang. Anggaran juga dipahami sebagai pernyataan yang berisi perincian penerimaan dan belanja operasional, ataupun belanja modal, bersama dengan rencana untuk tahun yang akan datang. Ketersediaan dana dan anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan, pengoperasian, serta pengawasan kegiatan operasi belanja operasional dalam suatu institusi atau lembaga dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya instansi pemerintah tersebut. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka tentu saja diperlukan suatu rencana yang sangat matang.

Aspek ketersediaan dana dan anggaran merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengimplementasian suatu program *e-Government*, hal ini dikarenakan ketersediaan dana dan anggaran akan menyangkut tentang apakah program-program *e-Government* tersebut dapat terlaksana atau tidak terlaksana dalam pengimplementasiannya. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi, membuat suatu *server* ataupun jaringan telekomunikasi secara luas, serta mempersiapkan tenaga pelaksana tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kajian serta analisis secara mendalam tentang kesiapan dana atau anggaran untuk pengimplementasian suatu program *e-Government* perlu dilakukan secara baik agar dana dan anggaran

yang telah tersedia tidak menjadi sia-sia akibat pelaksanaannya tidak diikuti dengan kesiapan di bidang pendukung lainnya. Penggunaan sumber dana dan anggaran untuk mengimplementasikan program *e-Government* juga harus dipertimbangkan secara matang, apakah akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau didanai dari pinjaman kepada pemerintah pusat. Jangan sampai tujuan yang diinginkan yaitu dapat tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui pelaksanaan *e-Government* yang menghabiskan dana yang cukup besar tidak dapat tercapai dengan baik tetapi justru menjadi tambahan beban keuangan daerah.

Pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan sebelumnya tentang bagaimana *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam aspek kesiapan dana atau anggaran untuk pengimplementasian program bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Untuk lebih jelasnya dari masing-masing aspek dari faktor ketersediaan dana dan anggaran dapat dilihat dari penjelasan di bawah ini.

4.4.1 Tersedianya Dana Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan pelayanan publik tentunya harus didukung penuh oleh adanya dukungan dana yang dapat menunjang keberlangsungan kegiatan tersebut. Dalam instansi pemerintah daerah biasanya biaya ini bersumber dari dana pemerintah yang telah melalui proses perencanaan anggaran secara matang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA, pelayanan ini memiliki bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Menurut hasil wawancara peneliti kepada Staff Bidang Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA mulai diterapkan pada bulan Oktober tahun 2016 dan perencanaan biaya penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dilaksanakan sejak akhir tahun 2016 dan ditetapkan mulai tahun anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2017, bersama dengan ditetapkannya APBD Kota Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Staff Bidang Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat diketahui bahwa anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA ini sudah dilaksanakan secara 4 kali, yaitu pada anggaran tahun 2017, anggaran tahun 2018, anggaran tahun 2019, dan juga anggaran tahun 2020. Dalam penjelasan mengenai jumlah anggaran, peneliti mengalami kesulitan dalam menemukan data

jumlah yang rinci untuk setiap tahunnya, hal ini terjadi karena terdapat beberapa data yang telah hilang dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Sehingga, peneliti hanya bisa memaparkan data anggaran tahun 2019 dan anggaran tahun 2020 untuk penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA yang dijelaskan seperti di bawah ini.

Tabel 4.6 Jumlah Anggaran Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran
1.	2019	Rp. 253.534.146
2.	2020	Rp. 196.717.400

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, 2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dana yang tersedia untuk penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 253.534.146 dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 196.717.400 yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Staff Bidang Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyatakan bahwa anggaran yang terserap di tahun 2019 dan tahun 2020 dapat terserap secara keseluruhan atau dalam kata lain dana yang terserap dari pemerintah daerah kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA persentase nya mencapai 100%.

Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan serta berdasarkan triangulasi sumber dari beberapa data yang peneliti peroleh, dapat dinilai bahwa sudah tersedianya dana yang dianggarkan untuk penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

4.4.2 Anggaran yang Tersedia Sesuai Dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA

Perhitungan besaran anggaran yang dibuat oleh suatu instansi pemerintah harus sudah dapat diperhitungkan secara matang dan disesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan konsep *e-Government* dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA ini diklasifikasikan ke dalam 3 jenis kebutuhan, yaitu perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan pada sistem pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA yang dijelaskan sebagai berikut.

4.4.2.1 Anggaran Perencanaan

Proses perencanaan penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA telah dilakukan sejak tahun 2015 yang dipelopori oleh Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, namun pelaksanaan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA

baru dapat dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2016. Sehingga, untuk anggaran dalam pembuatan sistem ini baru bisa ditetapkan pada pagu anggaran tahun 2017.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Staff Bidang Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa hal-hal yang dianggarkan dalam proses perencanaan penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA diantaranya yaitu belanja jasa tenaga ahli untuk membuat aplikasi BIMMA, lalu belanja sarana dan prasarana infrastruktur telekomunikasi seperti penambahan komputer, *laptop*, *netbook*, *printer*, *scanner*, dan jaringan internet. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti, maka peneliti berpendapat bahwa anggaran yang tersedia untuk perencanaan penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA sudah tersedia, meskipun memang sampai saat ini masih terdapat infrastruktur telekomunikasi yang masih kurang karena tidak tercantum dalam anggaran.

4.4.2.2 Anggaran Pengembangan

Suatu proses pengembangan juga harus diperhatikan, hal ini dikarenakan proses pengembangan akan mendukung keberhasilan kegiatan yang dilakukan dan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Sehingga, setiap kegiatan atau program yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus memperhatikan anggaran untuk proses pengembangan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Staff Bidang Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa hal-hal yang dianggarkan dalam proses pengembangan penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA diantaranya yaitu belanja jasa tenaga ahli untuk mengembangkan aplikasi BIMMA sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan bagi para pengguna, sehingga aplikasi BIMMA bisa memberikan pelayanan optimal atas kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti, maka peneliti berpendapat bahwa anggaran yang tersedia untuk pengembangan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah tersedia.

4.4.2.3 Anggaran Pemeliharaan

Selain dari proses perencanaan dan pengembangan, terdapat suatu proses yang juga cukup penting untuk dilakukan, yaitu proses pemeliharaan. Proses pemeliharaan dinilai cukup penting karena dapat berfungsi untuk memelihara infrastruktur telekomunikasi yang berkaitan dengan penerapan program *e-Government* agar dapat berjalan dengan baik dalam jangka waktu yang cukup panjang. Semakin infrastruktur telekomunikasi tersebut dipelihara dengan baik maka seluruh infrastruktur telekomunikasi yang ada dapat diminimalisir resiko rusaknya. Sehingga

dapat menunjang efisiensi biaya dan efektivitas terhadap pemberian pelayanan bursa kerja *online* kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Staff Bidang Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk proses pemeliharaan di tahun anggaran 2019 ataupun tahun anggaran 2020 ini belum tersedia anggaran apapun. Peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap laporan keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2020, dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Staff Bidang Keuangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tersebut dinyatakan benar bahwa proses pemeliharaan di tahun anggaran 2019 ataupun tahun anggaran 2020 ini belum tersedia anggaran apapun. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti, maka peneliti berpendapat bahwa anggaran yang tersedia untuk proses pemeliharaan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung belum tersedia. Secara keseluruhan dalam aspek ketersediaan dana dan anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah tersedia anggaran dan dana nya, namun anggaran dalam segi pemeliharaan masih belum dianggarkan.

Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan serta berdasarkan triangulasi sumber dari beberapa data yang peneliti peroleh serta merujuk pada pendapat Indrajit (2007:7-8) yang menyatakan bahwa “sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif *e-Government* yang akan diterapkan, membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya. Pemerintah daerah tertentu harus memiliki jaringan yang cukup terhadap berbagai sumber dana yang ada dan memiliki otoritas untuk menganggarkannya. Harap diperhatikan bahwa dana yang dibutuhkan tidak sekedar untuk investasi belaka, namun perlu pula dianggarkan untuk biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan dikemudian hari”, dapat diketahui bahwa pada faktor ketersediaan dana dan anggaran ini dapat diketahui bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah siap dalam menyelenggarakan program *e-Government*, hal ini dapat dibuktikan dari sudah terdapatnya dana dan anggaran yang tersedia sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, serta anggaran-anggaran tersebut telah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

4.5 Perangkat Hukum

Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, bersifat umum karena hukum berlaku bagi setiap orang dan bersifat normatif

karena hukum menentukan apa yang seyogyanya masyarakat lakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah tersebut. Pengimplementasian program *e-Government* sangat terkait erat dengan proses pendistribusian data/informasi mengenai data diri masyarakat dari satu pihak ke pihak lain serta proses pendistribusian keuangan dalam melakukan suatu pembayaran-pembayaran tertentu, sehingga masalah keamanan data/informasi mengenai data diri masyarakat serta pendistribusian keuangan masyarakat dalam melakukan suatu pembayaran merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis secara mendalam tentang bagaimana kesiapan peraturan yang berlaku dalam pengimplementasian suatu program *e-Government*. Sehingga dengan adanya peraturan maka hal ini dapat membuat masyarakat sebagai pengguna lebih percaya terhadap suatu program *e-Government* yang dilakukan oleh instansi pemerintah karena telah diatur dalam suatu perundang-undangan.

4.5.1 Ketersediaan Perangkat Hukum yang Menjadi Dasar Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online

Ketersediaan perangkat hukum dalam penyelenggaraan program *e-Government* merupakan suatu hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan bahwa perangkat hukum yang tersedia dapat dijadikan sebagai pedoman yang sah dan perangkat hukum pun dapat memberikan perlindungan hukum kepada setiap pihak-pihak yang terlibat. Pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan sebelumnya tentang ketersediaan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Sebelum pembahasan mengenai peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pelayanan bursa kerja *online*, peneliti ingin memaparkan terlebih dahulu mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan *e-Government*. Berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa terdapat beberapa peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan *e-Government*, yaitu:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*,
2. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1338 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 menjadi pintu gerbang utama dalam perkembangan *e-Government* di Indonesia. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, *e-Government* ditujukan untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam

mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* mengamanatkan setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-Government* secara nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan *e-Government* di Kota Bandung telah diatur pelaksanaannya pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1338 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang pengelolaan dan manajemen organisasi teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi di lingkungan Kota Bandung. Selain itu juga, dalam peraturan ini telah mengatur tentang setiap perangkat daerah yang memiliki aplikasi spesifik harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan sistem dan informasi. Sehingga dengan terdapatnya peraturan tersebut dapat menjadi jaminan terhadap keamanan data bagi masyarakat sebagai pengguna aplikasi.

Pelaksanaan *e-Government* tersebut sangat berakitan dengan pelaksanaan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa penempatan tenaga kerja melalui pelayanan bursa kerja *online* tersebut telah diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada BAB VI Tentang Penempatan Tenaga Kerja,
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja pada BAB V Tentang Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja yang tertulis bahwa pelayanan penempatan tenaga kerja dapat dilakukan secara manual atau melalui *system online* yang terintegrasi dengan Sistem Penempatan Tenaga Kerja Nasional,
3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan BAB VII Pasal 30 yang menjelaskan bahwa informasi pasar kerja dikumpulkan, dianalisis, dan diolah pemerintah daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui lembar bursa tenaga kerja yang dipasang pada papan bursa kerja, pameran kesempatan kerja dan/atau media cetak/elektronik.

Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penempatan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja dilakukan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan program nasional dan daerah. Lalu kemudian, dalam pelaksanaan penempatan tenaga kerja di setiap daerah juga diatur mengenai penyelenggaraan penempatan tenaga kerja tersebut menurut peraturan daerah nya masing-masing. Peneliti menganalisis penyelenggaraan penempatan tenaga kerja di Kota Bandung sehingga peneliti mengacu kepada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa informasi pasar kerja dikumpulkan, dianalisis, dan diolah pemerintah daerah untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui lembar bursa tenaga kerja yang dipasang pada papan bursa kerja, pameran kesempatan kerja dan/atau media cetak/elektronik.

Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan serta berdasarkan triangulasi sumber dari beberapa data yang peneliti peroleh serta merujuk pada pendapat (Iswandari 2021:117) yang menyatakan bahwa "pemerintah seharusnya memberikan jaminan hukum yang tepat terhadap keamanan data pribadi sehingga pelayanan melalui sistem *e-Government* yang diterapkan kedepannya memiliki keamanan yang cukup sehingga masyarakat dapat percaya dengan reformasi birokrasi berbasis digital yang sedang dibangun oleh pemerintah", dapat diketahui bahwa bahwa keberadaan perangkat hukum menjadi faktor yang cukup penting untuk tersedia sebagai bentuk jaminan kepada masyarakat dan telah terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Perangkat hukum tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.

4.5.2 Sosialisasi Perangkat Hukum

Setelah diketahui bahwa telah terdapat perangkat hukum untuk menyelenggarakan program *e-Government* di instansi pemerintah, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah adalah menyosialisasikan pemahaman mengenai perangkat hukum tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti para pegawai pemerintah sebagai pengelola layanan *e-Government* dan masyarakat sebagai pengguna pada layanan *e-Government* tersebut. Perangkat hukum tersebut perlu untuk disosialisasikan

agar perangkat hukum tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan para pegawai serta masyarakat dapat mematuhi perangkat hukum tersebut dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Aspek sosialisasi ini dijadikan sebagai aspek pendukung dalam menganalisis faktor perangkat hukum. Penjelasan mengenai aspek sosialisasi perangkat hukum dibagi menjadi 2 (dua) yang akan di jelaskan di bawah ini.

4.5.2.1 Pegawai Mengetahui Adanya Perangkat Hukum yang Mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online

Perangkat hukum merupakan suatu acuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ataupun tugas-tugas yang dilakukan di suatu instansi pemerintah. Perangkat hukum harus tersedia agar para pegawai pemerintah dapat mematuhi standar ataupun batasan-batasan tertentu yang telah dicantumkan dalam aturan yang dibuat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik di akhir kegiatan. Oleh karena itu, apabila sudah terdapat perangkat hukum yang mengatur tentang suatu program pemerintah, maka para pegawai pemerintah wajib untuk dapat mengetahui dan memahami mengenai perangkat hukum tersebut. Apabila terdapat pegawai yang tidak mengetahui adanya perangkat hukum yang mengatur pekerjaannya, dikhawatirkan nantinya hasil pekerjaan yang diselesaikan oleh pegawai tersebut tidak tepat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam aturan tersebut.

Para pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung pun perlu untuk mengetahui dan memahami perangkat hukum apa saja yang mengatur penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA tersebut. Dengan diketahuinya mengenai perangkat hukum tersebut oleh para pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, maka para pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung akan melakukan pekerjaan dalam mengelola pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA sesuai dengan peraturan yang telah diatur.

Untuk mengetahui sejauhmana pemahaman para pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam mengetahui dan memahami perangkat hukum yang berkaitan dengan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA tersebut, maka peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang dan Staff di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan dari hasilnya dapat dinyatakan bahwa pihak-pihak tersebut sudah mengetahui adanya perangkat hukum yang berkaitan dengan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Peneliti melakukan pemeriksaan silang mengenai pemahaman soal perangkat hukum yang berkaitan dengan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA kepada Kepala Bidang dan Staff di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja

Kota Bandung dan mendapatkan hasil bahwa setiap pihak tersebut dapat menjabarkan pemahamannya mengenai perangkat hukum tersebut dengan baik serta sudah memahami mengenai tanggungjawab serta kewajibannya sebagai pegawai pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelaksanaan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung khususnya Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat permasalahan dalam pengimplementasian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja pada BAB V Tentang Mekanisme Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja menjelaskan bahwa Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara manual atau melalui *online system* kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat. Kewajiban pelaporan lowongan pekerjaan ini juga diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan BAB VII Pasal 20 yang menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan ke pemerintah daerah. Namun, dalam pengimplementasiannya berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung pada tahun 2020 sangat minim dalam penindakan penegakan sanksi kepada perusahaan yang tidak melakukan kewajiban untuk melaporkan lowongan pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa minimnya penindakan penegakan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung pada tahun 2020 kepada perusahaan yang tidak melakukan wajib lapor lowongan pekerjaan dikarenakan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan menjelaskan bahwa pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud (pelaporan informasi lowongan pekerjaan) maka akan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Menurut pihak pegawai pada Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sanksi pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut dinilai tidak dapat membawa efek jera kepada perusahaan yang tidak melakukan wajib lapor lowongan pekerjaan di aplikasi BIMMA. Sehingga, sampai dengan saat ini pihak pegawai dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mengalami kesulitan untuk dapat meningkatkan kesadaran bagi perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk dapat melakukan wajib lapor lowongan pekerjaan di aplikasi BIMMA. Walaupun sanksi tersebut sudah pernah ditegakkan oleh para pegawai dari Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung kepada setiap perusahaan yang telah terdaftar untuk dapat melakukan wajib lapor lowongan, tetapi pada nyatanya sanksi tersebut dinilai tidak dapat membawa efek jera kepada perusahaan yang tidak melakukan wajib lapor lowongan pekerjaan di aplikasi BIMMA.

Oleh karena itu, berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan serta berdasarkan triangulasi sumber dari beberapa data yang peneliti peroleh serta merujuk pada, peneliti berpendapat bahwa para pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah dapat mengetahui dan memahami adanya perangkat hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Namun, terdapat permasalahan mengenai masih minimnya penindakan penegakan sanksi kepada perusahaan yang tidak melakukan kewajiban untuk melaporkan lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Hal ini dikarenakan sanksi pada aturan tersebut tersebut dinilai tidak dapat membawa efek jera kepada perusahaan yang tidak melakukan wajib lapor lowongan pekerjaan di aplikasi BIMMA.

4.5.2.2 Masyarakat Mengetahui Adanya Perangkat Hukum yang Mengatur Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online

Masyarakat sebagai pengguna yang menerima layanan dari instansi pemerintah juga perlu untuk mengetahui perangkat hukum yang berkaitan terhadap layanan yang dirasakannya tersebut. Masyarakat perlu tahu soal pelayanan tersebut karena masyarakat harus mendapatkan penjelasan secara komperhensif tentang prosedur penggunaannya dan juga ketentuan lainnya yang telah disahkan secara resmi sehingga dapat menghindari pungutan liar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada masyarakat Kota Bandung sebagai pengguna aplikasi BIMMA diketahui bahwa kedua informan tersebut belum mengetahui adanya peraturan yang berkaitan dengan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Masyarakat Kota Bandung sebagai pengguna aplikasi BIMMA lebih mengetahui perangkat hukum mengenai pelaksanaan program *e-Government* daripada mengetahui soal perangkat hukum yang berkaitan dengan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan serta berdasarkan triangulasi sumber dari beberapa data yang peneliti peroleh serta merujuk pada pendapat (Rosana 2014:2) yang menyatakan bahwa “kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat lebih patuh terhadap hukum, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat”, peneliti berpendapat bahwa sosialisasi kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum dan pada aspek mengenai sosialisasi kepada masyarakat masih belum dapat terpenuhi dengan baik, hal tersebut dikarenakan masyarakat Kota Bandung belum mengetahui secara jelas mengenai perangkat hukum yang mengatur tentang pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Sehingga menurut pandangan peneliti, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung perlu lebih gencar dalam melakukan sosialisasi mengenai perangkat hukum tersebut kepada masyarakat. Pada aspek sosialisasi perangkat hukum ini peneliti berpendapat bahwa sosialisasi kepada para pegawai sudah cukup terlaksana dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan dipahaminya tanggungjawab dan tugas oleh para pegawai dalam melakukan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan untuk sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan sosialisasi ini masih belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat Kota Bandung sebagai pengguna aplikasi BIMMA belum mengetahui terhadap perangkat hukum yang berkaitan dengan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

Dengan merujuk kepada pendapat Indrajit (2007:7-8) yang menyatakan bahwa “pemerintah harus memiliki perangkat hukum yang dapat menjamin terciptanya mekanisme *e-Government* yang kondusif.” Dengan demikian, berdasarkan rujukan tersebut dapat diketahui bahwa pada faktor perangkat hukum ini sudah dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini dikarenakan sudah terdapat perangkat hukum yang berkaitan dengan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Namun, proses sosialisasi perlu untuk ditingkatkan lagi agar masyarakat Kota Bandung sebagai pengguna aplikasi BIMMA dapat mengetahui perangkat hukum yang berkaitan dengan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

4.6 Perubahan Paradigma

Paradigma merupakan cara pandang seseorang terhadap dirinya serta lingkungannya yang akan mempengaruhi dirinya sendiri untuk dapat berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertindak laku (konatif). Paradigma juga dapat berarti sebagai seperangkat konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan

dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual.

Perkembangan teknologi informasi (TI) dan internet telah menjadi alat kekuatan dalam perubahan pada sistem pemerintahan dengan model yang modern. Teknologi informasi dan internet mendorong transformasi perubahan dari paradigma birokrasi tradisional (yang menekankan kepada rutinitas, spesialisasi, fokus internal dan kewenangan), menuju paradigma *e-Government* (yang menekankan kepada membangun jaringan yang terkoordinasi, kerjasama eksternal dan orientasi pelayanan kepada *customer/masyarakat* sebagai fokusnya). Sehingga saat ini teknologi informasi menjadi salah satu elemen utama dalam mendorong transformasi perubahan paradigma dalam lingkungan pemerintahan.

Perkembangan konsep *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* diperlukan suatu penataan sistem manajemen dan transformasi paradigma ke arah yang lebih modern di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Transformasi paradigma ini akan terfokus kepada dibutuhkannya suatu kesadaran dan dibutuhkannya suatu tekad yang kuat untuk dapat merubah terkait dengan cara kerja, cara bersikap, cara berperilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Jika para pimpinan dan pegawai di instansi pemerintah tidak bersedia untuk melakukan perubahan, maka dapat dikatakan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan tersebut tidak siap untuk menerapkan program *e-Government*. Pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang peneliti lakukan sebelumnya tentang bagaimana *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam beradaptasi menggunakan sistem teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA. Penjelasan lebih jelasnya mengenai faktor perubahan paradigma ini dapat dilihat dari aspek-aspek di bawah ini:

4.6.1 Pandangan Pegawai terhadap Perbandingan Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja *Online* dan Pelayanan Bursa Kerja *Offline*

Untuk dapat menganalisis mengenai faktor-faktor perubahan paradigma dalam *e-Readiness* tersebut di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung maka perlu untuk diketahui juga tentang bagaimana perbandingan pandangan pegawai saat menyelenggarakan bursa kerja *offline* dengan saat menyelenggarakan bursa kerja *online*. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui apakah selama proses persiapan penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA tersebut para pegawai telah berhasil dalam mengubah paradigma nya untuk dapat mengikuti kepada arah

perubahan yang dilakukan. Munculnya aplikasi BIMMA menjadi suatu langkah perubahan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Aplikasi BIMMA sudah dapat mewadahi seluruh bagian yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, salah satunya ialah Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertanggungjawab untuk penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online*. Dengan adanya aplikasi BIMMA tersebut dapat merubah cara kerja lama (tradisional) menjadi cara kerja baru (modern). Seperti yang dijelaskan dalam wawancara kepada pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang mengelola aplikasi BIMMA menjelaskan bahwa terdapat cara kerja baru yang dilakukan oleh para pegawai dengan munculnya pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA, perubahan cara kerja tersebut dapat dilihat dari sebelum adanya aplikasi BIMMA semua proses pelayanan dalam aspek bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja dilakukan secara luar jaringan / *offline* dan masih menggunakan dokumen-dokumen tertulis secara cetak (*print out*), namun untuk sekarang ini dengan mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi membuat semua proses pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah tidak ada lagi yang menggunakan dokumen-dokumen kertas cetak (*print out*) dan sudah tidak ada lagi interaksi personal antara pegawai dan masyarakat, melainkan semua pelayanan publik oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah dapat dilakukan melalui media-media elektronik sehingga membuat tidak adanya lagi suatu proses interaksi personal atau proses tatap muka antara pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan masyarakat Kota Bandung di dalam pemberian pelayanan bursa kerja *online* tersebut.

Semua

proses dalam pelayanan bursa kerja *online* mengalami perubahan yang signifikan dalam proses penyelenggaraan pelayanannya, hal ini dapat diketahui dari yang sebelum adanya aplikasi BIMMA, informasi pasar kerja hanya bisa diketahui melalui papan lowongan kerja yang ada di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, sehingga masyarakat Kota Bandung perlu melihat informasi lowongan pekerjaan tersebut melalui papan lowongan kerja di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung secara *offline*. Tetapi, dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman merubah layanan tersebut menjadi sepenuhnya menjadi layanan yang bersifat *online*, sehingga informasi lowongan pekerjaan dapat diakses setiap waktu melalui aplikasi BIMMA. Lalu selanjutnya, dalam proses pelamaran pekerjaan yang sebelumnya harus dilakukan secara di luar jaringan / *offline*, tetapi pada saat ini untuk lamaran kerja sudah bisa dilakukan secara *online*.

4.6.2 Pandangan Pertama Pegawai terhadap Perubahan Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online

Pandangan pertama dari seorang pegawai dalam melakukan suatu perubahan dalam instansi pemerintah merupakan salah satu hal yang perlu untuk diketahui oleh suatu instansi pemerintah dalam melakukan perubahan. Hal tersebut perlu untuk diketahui karena pandangan pertama dapat membentuk jalan pikiran seorang pegawai dalam menghadapi suatu kondisi dalam jangka waktu tertentu. Dengan mengetahui pandangan pertama para pegawai dalam melakukan perubahan, maka hal itu dapat membantu para pimpinan untuk menentukan rencana strategi yang tepat dalam merubah suatu paradigma, sehingga dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi dalam melakukan suatu perubahan paradigma di instansi pemerintah.

Begitu pula halnya dengan penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung perlu untuk mengetahui pandangan pertama dari para pegawai saat pertama kali merasakan terjadinya perubahan sistem pelayanan dari sistem *offline* menuju kepada sistem *online*. Tentunya akan terdapat beberapa banyak pandangan yang berbeda dari para pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam melihat perubahan-perubahan sistem pelayanan yang terjadi.

Berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada para pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa dengan adanya perubahan zaman dan perkembangan teknologi, hal ini menuntut semua pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, hal ini dikarenakan bahwa masyarakat Kota Bandung dinilai sangat adaptif dengan perubahan-perubahan terjadi, maka dari itu sebagai penyelenggara pelayanan publik pun Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tidak boleh sampai ketinggalan terhadap perubahan teknologi tersebut, sehingga seluruh pegawai dituntut untuk dapat melekat terhadap perubahan teknologi. Meskipun demikian, pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa pada awalnya mereka mengalami kesulitan dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi, hal itu terjadi karena kompleksnya perubahan yang terjadi dari sistem pelayanan *offline* menuju *online* tersebut. Untuk dapat mengatasi perubahan paradigma yang terjadi, pihak pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung membutuhkan waktu sekitar kurang lebihnya selama 8 (delapan) bulan untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dalam pekerjaannya untuk proses penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

Selanjutnya peneliti mendapatkan informasi dari pegawai lainnya dari Bidang Penempatan Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang menyampaikan bahwa pelayanan sistem *offline* dirasa lebih mudah karena menurut pegawai tersebut kegiatan pelayanan yang sifatnya *offline* sudah bertahun-tahun dilakukan, sehingga dengan adanya perubahan ini membuat pegawai tersebut mengalami kesulitan dan membutuhkan banyak pembelajaran yang mumpuni untuk dapat beradaptasi. Sampai dengan saat ini, pegawai yang telah berusia 51 tahun tersebut, sudah bisa beradaptasi walaupun masih mengalami beberapa kendala yang terjadi.

Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan, maka peneliti berpendapat bahwa proses adaptasi dalam perubahan paradigma lama menuju kepada paradigma baru telah dapat dilakukan dengan baik oleh pegawai Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pegawai yang berusia di bawah 35 tahun dan pegawai yang berusia di atas 35 tahun, telah menyatakan dapat beradaptasi dengan baik dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA tersebut.

4.6.3 Kesadaran dan Keinginan Pegawai untuk Merubah Paradigma

Kesadaran dan keinginan merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang pegawai dalam melakukan perubahan paradigma. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya kesadaran dan keinginan tersebut dapat dikatakan bahwa individu atau kelompok yang berkaitan tersebut belum siap dalam menyelenggarakan program *e-Government*. Dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* tersebut pun dibutuhkan sekali adanya kesadaran dan keinginan untuk berusaha mengubah paradigmanya dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Informasi yang peneliti dapatkan dari pegawai Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa pada saat munculnya perubahan-perubahan sistem pelayanan *offline* menuju kepada sistem pelayanan *online*, terdapat beberapa pegawai yang menolak adanya perubahan tersebut, tetapi seiring waktu berjalan para pegawai pun menyadari akan pentingnya suatu sistem pelayanan *online* untuk menghadapi perkembangan teknologi dan menghadapi perubahan sistem kerja. Sehingga, rasa keinginan pegawai untuk belajar dan beradaptasi dengan sistem *online* ini pun terus mengalami peningkatan.

Selain itu, orientasi efisiensi cara kerja di dalam pemberian pelayanan pun bergeser kepada orientasi yang menekankan pada fleksibilitas dan kepuasan pengguna. Fleksibilitas yang dimaksud oleh peneliti merupakan pemberian kesempatan bagi para pegawai untuk membuat pilihannya sendiri mengenai kapan, dimana, dan bagaimana mereka terlibat dalam proses pelayanan bursa kerja *online*. Hal

ini disesuaikan dengan bagaimana strategi yang akan mereka lakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat sebagai pengguna, sehingga fleksibilitas tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas kepuasan pengguna. Perubahan-perubahan terhadap cara kerja dalam melakukan pelayanan tersebut sudah dapat terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran bagi para pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah menganggap bahwa cara kerja yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi itu dianggap sangat penting, karena hal tersebut menjadi suatu tantangan untuk dapat bisa memahami perkembangan teknologi yang dilatarbelakangi dengan terjadinya pandemi *Covid-19* yang mengharuskan para pegawai untuk bisa melakukan pekerjaannya dengan jarak jauh, sehingga dibutuhkan kemampuan pegawai untuk bisa beradaptasi dengan teknologi dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal dikondisi yang sangat terbatas seperti saat ini.

Dengan merujuk kepada pendapat (Taufik and Sapto Nugroho 2020:75) yang menyatakan bahwa “tuntutan pembaruan organisasi menurut perubahan organisasi dapat berasal dari kondisi internal dan eksternal yang tidak diharapkan, munculnya ketidakwajaran, inovasi yang berdasarkan kebutuhan proses, perubahan struktur industri atau struktur pasar, demografi, perubahan persepsi, suasana dan makna serta pengetahuan baru. Dari hal tersebut akan bermuara pada adanya tuntutan kepada organisasi untuk mengembangkan dirinya”. Dengan demikian, berdasarkan rujukan tersebut dengan adanya pembaharuan dalam sistem kerja organisasi maka dibutuhkan pula pengembangan dari aspek-aspek lainnya yang salah satunya ialah mengenai kesadaran dan keinginan pegawai untuk dapat berubah dalam sistem kerja.

Perubahan sistem kerja dalam pelayanan ini sangat berpengaruh terhadap cara kerja dari para pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung khususnya Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, karena semua pekerjaan yang dilakukan oleh para pegawai harus sudah dapat terintegrasi ke dalam satu aplikasi BIMMA sehingga dalam pelaksanaan pekerjaannya dibutuhkan suatu kompetensi khusus dari para pegawai untuk bisa memahami tentang cara menggunakan dan mengakses teknologi tersebut. Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan menyatakan bahwa sampai dengan pada saat ini semua pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap perkembangan teknologi, sehingga para pegawai sudah dapat memahami tentang bagaimana cara menggunakan dan mengakses teknologi yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

4.6.4 Strategi Pimpinan untuk Merubah Paradigma Pegawai

Seorang pemimpin mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan suatu perubahan paradigma dalam penyelenggaraan program *e-Government*. Seorang pemimpin harus memiliki perencanaan yang tepat untuk melakukan strategi dalam membawa para pegawainya untuk dapat berhasil mengubah cara mendasar seseorang dalam memahami, dalam berfikir, dalam menilai, dan dalam melakukan sesuatu yang sudah terbentuk dari jangka waktu yang lama dan menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan baru. Maka dari itu, untuk mengubah paradigma seseorang atau sekelompok orang memerlukan suatu strategi yang tepat dalam memimpin suatu perubahan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA ini yang berperan sebagai pimpinan adalah Kepala Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Pihak tersebut merupakan pihak yang harus berperan sebagai pemimpin dalam mengubah paradigma pegawainya, karena pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan dan penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* ialah Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam mempelajari dan memahami mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi para pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota membutuhkan suatu proses yang panjang, tidak serta merta pemahaman pegawai terhadap teknologi bisa dipahami secara instan, tetapi membutuhkan suatu proses pembelajaran dan pelatihan yang rutin dan memadai. Menurut penjelasan dari hasil wawancara oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menjelaskan bahwa untuk dapat merubah paradigma lama (tradisional) menuju kepada paradigma baru (modern) yang erat kaitannya dengan pelaksanaan *e-Government* membutuhkan sosialisasi dan pelatihan khusus untuk para pegawai. Bagi para pegawai yang berkaitan langsung dengan pengelolaan aplikasi BIMMA, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyediakan kesempatan pelatihan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu satu tahun, pelatihan tersebut bertujuan untuk dapat meningkatkan tingkat kompetensi pegawai dalam bidang teknologi informasi untuk mengelola aplikasi BIMMA. Selain itu, terdapat pelaksanaan sosialisasi secara berkala dari pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dibantu oleh Tim Pengembang Aplikasi BIMMA kepada seluruh pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk dapat mensosialisasikan dan mendiskusikan terkait dengan pembaharuan fitur-fitur layanan pada aplikasi BIMMA serta penjelasan fungsi dari setiap fitur-fitur layanan yang tersedia tersebut.

Lebih dari itu, biasanya juga dilakukan diskusi terbuka untuk pembahasan mengenai keluhan-keluhan masyarakat sebagai pengguna dalam menggunakan aplikasi BIMMA sehingga dapat meningkatkan

partisipasi pegawai dalam memberikan masukan untuk pembaharuan fitur-fitur layanan pada aplikasi BIMMA tersebut. Sehingga, dapat diketahui bahwa para pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah dapat beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan teknologi untuk melakukan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA dengan mengikuti pelatihan dan sosialisasi rutin yang dilakukan oleh para pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Dengan merujuk kepada pendapat (Taufik and Sapto Nugroho 2020:75) yang menyatakan bahwa “pemimpin yang tidak hanya pandai memberikan instruksi saja, akan tetapi pemimpin harus mampu menjadi seorang fasilitator, koordinator, konselor dan motivator bagi semua anggota organisasi. Pemimpin yang efektif harus mengelola perubahan sebagai sebuah pertanggungjawaban. Untuk mengelola perubahan, pemimpin saat ini seharusnya mengembangkan pendekatan-pendekatan yang sesuai dalam mengadopsi dan mengimplementasikan perubahan tersebut. Sehingga proses perubahan dalam organisasi yang akan dilaksanakan memperoleh dukungan dari semua anggota organisasi.”. Dengan demikian, berdasarkan rujukan tersebut dengan adanya pembaharuan dalam sistem kerja organisasi maka dibutuhkan pula pengembangan dari aspek-aspek lainnya yang salah satunya ialah mengenai strategi pimpinan dalam merubah paradigma pegawai. Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan dapat diketahui dapat dinilai terpenuhi karena Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah memiliki strategi untuk membantu pegawainya dalam mengubah paradigma dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja menjadi sistem *online*.

4.6.5 Hambatan Perubahan Paradigma Pegawai

Mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses perubahan paradigma menjadi suatu hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan hal-hal yang menjadi hambatan tersebut dapat dijadikan sebagai evaluasi atau perbaikan untuk langkah selanjutnya. Hambatan-hambatan tersebut dapat dianalisis yang kemudian digunakan untuk dicarikan solusi yang tepat dalam mengatasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyampaikan bahwa terjadinya hambatan ataupun kesulitan dalam proses perubahan paradigma tersebut dikarenakan proses adaptasi yang sulit, proses adaptasi tersebut menjadi sulit karena para pegawai sudah terbiasa dengan sistem pelayanan dengan menggunakan sistem manual selama bertahun-tahun sebelum terjadinya perubahan. Lalu, terdapat pegawai yang mempunyai *mindset* bahwa perubahan tersebut hanya membuat pekerjaannya menjadi sulit, sehingga lebih memilih untuk tidak melakukan perubahan dari sistem pelayanan

yang dilakukan. Kemudian dari hasil wawancara pegawai di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan bahwa faktor yang menjadi hambatan dalam perubahan paradigma ialah faktor usia dan tingkat pendidikan. Untuk pegawai yang lebih tua biasanya lebih sulit untuk melakukan perubahan-perubahan yang terjadi dan untuk pegawai yang bukan berlatar belakang pendidikan di bidang teknologi juga sulit mengalami perubahan paradigma tersebut. Sehingga, faktor-faktor tersebut yang menjadi hambatan dalam perubahan paradigma di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan perubahan paradigma di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan paradigma antara lain seperti mempunyai *mindset* bahwa perubahan tersebut hanya membuat pekerjaannya menjadi sulit, faktor usia, dan faktor latar belakang pendidikan.

Dengan merujuk kepada pendapat Indrajit (2007:7-8) yang menyatakan bahwa “perubahan paradigma ini akan bermuara pada dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk merubah cara kerja, bersikap, perilaku, dan kebiasaan sehari-hari”. Dengan demikian, berdasarkan rujukan tersebut dapat diketahui bahwa pada faktor perubahan paradigma pegawai ini dinilai sudah siap dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA, hal ini dapat dilihat dari setiap aspeknya yang menjelaskan bahwa para pegawai sudah memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan layanan yang berbasis teknologi, kemudian para pegawai sudah menganggap bahwa perubahan layanan yang berbasis teknologi itu sangat penting, lalu Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung sudah memiliki strategi yang dapat membantu para pegawai nya dalam melakukan perubahan paradigma yang baru sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Walaupun masih terdapat hambatan lainnya, tetapi secara keseluruhan peneliti berpendapat bahwa faktor perubahan paradigma pegawai ini dinilai sudah siap dalam menyelenggarakan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

4.7 Pandangan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah tentunya harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat menjadi salah satu pihak yang merasakan dampak dari setiap inovasi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Sehingga, penting untuk dianalisis

mengenai pandangan masyarakat terhadap setiap inovasi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA mempunyai tujuan yang salah satunya ialah untuk menyediakan informasi pasar kerja bagi masyarakat, sehingga di bawah ini merupakan hasil analisis peneliti mengenai pandangan masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

4.7.1 Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA Kepada Masyarakat

Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan oleh pihak instansi pemerintah kepada masyarakat dalam menyelenggarakan suatu program ataupun kegiatan yang melibatkan atau yang ditujukan untuk masyarakat. Terutama apabila terjadi perubahan proses prosedur pelayanan yang harus dimengerti oleh masyarakat sehingga alangkah lebih baik apabila pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan secara massif kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami hal tersebut.

Untuk melakukan analisis terhadap pandangan masyarakat mengenai penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA, peneliti melakukan wawancara kepada dua informan yang menjadi pengguna aplikasi BIMMA. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada masyarakat sebagai pengguna dapat diketahui bahwa diketahuinya pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA tersebut dari *platform* sosial media seperti *Instagram* dan *Twitter* dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Sedangkan informan lainnya menyampaikan bahwa diketahuinya pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA tersebut dari papan informasi di kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Selain itu, peneliti juga menemukan bukti kegiatan sosialisasi dari studi dokumentasi yang mana kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan diberbagai *platform* sosial media seperti *Instagram*, *Twitter*, serta berita-berita di berbagai media. Informasi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dari sosial media tersebut mencakupi hal-hal tentang penjelasan umum pelayanan bursa kerja *online*, fungsi dan manfaat dari pelayanan bursa kerja *online*, serta cara penggunaan aplikasi BIMMA.

Berdasarkan hasil wawancara dan bukti studi dokumentasi yang peneliti temukan dari berbagai *platform* sosial media seperti *Instagram*, *Twitter*, serta berita-berita di berbagai media, maka peneliti berpendapat bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

4.7.2 Kemudahan Masyarakat dalam menggunakan Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA

Sesuai dengan tujuan dari pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA yang mempunyai salah satu tujuannya untuk menyediakan informasi pasar kerja bagi masyarakat dan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja masyarakat, sehingga seharusnya pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai pengguna aplikasi BIMMA.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat sebagai pengguna aplikasi BIMMA menyatakan bahwa dengan berubahnya proses pelayanan bursa kerja tersebut pihak masyarakat merasakan banyak kemudahan dalam mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan kemudahan untuk melakukan pelamaran kerja, karena dengan adanya pelayanan *online* tersebut proses pelamaran kerja bisa dilakukan secara *online* pula. Hal ini pun selaras dengan yang disampaikan oleh informan lain yang menyatakan bahwa dengan adanya pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA ini dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan, sehingga tidak perlu lagi untuk datang ke kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung karena seluruh proses pelayanan bisa dilakukan melalui *smartphone* masing-masing.

Berdasarkan triangulasi teknik yang telah dilakukan dari beberapa informan dapat diketahui dapat diketahui bahwa terdapat kesamaan perspektif terhadap kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA ini, sehingga peneliti berpendapat bahwa pelayanan tersebut membawa dampak yang baik untuk masyarakat.

4.7.3 Saran untuk Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA

Semua proses pelayanan yang sedang dikerjakan oleh pihak instansi pemerintah tentunya akan berkaitan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna aplikasi, yang artinya setiap proses pelayanan tersebut perlu melibatkan pandangan masyarakat dalam segala urusannya, diantaranya dengan menerima kritik dan saran agar penyelenggaraan pelayanan tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA ditujukan untuk mempermudah proses layanan dibidang ketenagakerjaan, sehingga pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung perlu untuk menampung dan menerima kritik dan saran dari masyarakat mengenai penyelenggaraan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat sebagai pengguna aplikasi BIMMA menyampaikan bahwa saran yang ingin disampaikan

untuk perbaikan dari pelayanan bursa kerja *online* ialah adanya informasi lowongan pekerjaan yang selalu terbaharui dan jumlah informasi lowongan pekerjaan yang jumlahnya banyak, sehingga dapat membantu masyarakat dalam menemukan kesempatan kerja yang tepat sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan lain bahwa jumlah informasi lowongan pekerjaan di aplikasi BIMMA perlu untuk diperbanyak dan diperbaharui secara berkala serta perlu untuk lebih memperjelas keterangan informasi lainnya seperti persyaratan pekerjaan yang dijelaskan secara rinci sehingga dapat mudah dipahami dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam melakukan pelamaran pekerjaan.

Dengan merujuk kepada pendapat Putra, Warsito, dan Herawati (2017:2) yang menyatakan bahwa “penerapan *e-Government* secara esensial merupakan tindakan inovatif bagi terselenggarakannya pelayanan publik yang dapat menciptakan kepercayaan dan kepuasan masyarakat kepada pemerintah”. Dengan demikian berdasarkan rujukan tersebut maka dapat diketahui bahwa masyarakat mendapatkan rasa kepuasan dari adanya pelayanan tersebut dan mayoritas masyarakat memberikan saran mengenai pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA untuk peningkatan pelayanan publik dalam proses pelayanannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA sudah dapat dikatakan siap. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor-faktor penentu kesiapan penerapan *e-Government* yang sudah dapat terpenuhi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Terdapat 5 (lima) faktor yang sudah terpenuhi dan 1 (satu) faktor yang belum terpenuhi terkait dengan faktor yang mempengaruhi *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, 5 (lima) faktor yang sudah terpenuhi yaitu infrastruktur telekomunikasi, tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah, ketersediaan dan anggaran, perangkat hukum, perubahan paradigma, dan pandangan masyarakat.

Kesiapan tersebut dapat diketahui dari sudah tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dan memadai sesuai dengan kebutuhannya, sarana dan prasarana tersebut sudah dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik oleh para pegawai, sudah tersedianya dana dan anggaran yang telah ditetapkan melalui APBD Kota Bandung, sudah tersedianya perangkat hukum mengenai pelaksanaan pelayanan bursa kerja *online*, sudah adanya kesadaran dan juga keinginan yang dimiliki oleh para pegawai untuk dapat beradaptasi dengan perubahan, dan masyarakat merasakan dampak yang baik dari pelayanan bursa kerja *online*.

Namun, dari semua faktor mengenai kesiapan tersebut, terdapat satu faktor yang menjadi permasalahan dalam *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yaitu kesiapan sumber daya manusia di pemerintah. Dalam faktor ini dapat diketahui bahwa belum dapat dinilai siap karena masih terjadinya tumpang tindih tanggungjawab dan tugas antara pegawai tetap dan pegawai kontrak dan masih terdapatnya kekurangan pemanfaatan kuantitas SDM dalam menjalankan tugas mencari pekerjaan.

Secara

keseluruhan, peneliti melihat hasil pembahasan dari faktor-faktor tersebut serta mempertimbangkan pandangan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA, peneliti berpendapat bahwa *e-Readiness* Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja *online* melalui aplikasi BIMMA sudah siap sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai pengguna aplikasi BIMMA.

REFERENSI

Buku

- Ardipandanto, Aryojati, Handrini Ardiyanti, Ahmad Budiman, and Debora Sanur. 2015. *Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Bagi Pelayanan Publik Dan Keamanan Nasional Di Daerah*. edited by I. Pahlevi. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia.
- Indrajit, Richardus Eko. 2007. *Electronic Government in Action - Strategi Implementasi Di Berbagai Negara*.
- Indrayani, Etin. 2020. *E-Government: Konsep, Implementasi Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendikia.
- Iswandari, Bunga Asoka. 2021. “Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28(1):115–38.
- Kagoya, Sumaya M., Gilbert Maiga, and Dev Jani. 2018. “An E-Government Readiness Assessment Framework for Uganda (A Case Study of Ugandan Ministries).” *14th ORSEA Conference Proceedings Nov. 2018* (123).
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.

Jurnal

- Abdulwahid, Hayder Sabah, Mohammed Kalid Salman, and Alia J. Ouda. 2019. “Identify and Assessing the E-Readiness of Public Organizations (Case Study in Iraq).” *AIP Conference Proceedings* 2144(August).

- Azab, Nahed A. 2009. "Assessing Electronic Government Readiness of Public Organizations." *Innovation and Knowledge Management in Twin Track Economies Challenges and Solutions - Proceedings of the 11th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2009* 1–3:364–65.
- Cedric, Steve. 2020. "E-Government Readiness Assessment for Government Institutions in Burundi." *International Journal of European Studies* 4(1):1.
- Epa, Nesty, Sampara Lukman, and Ella Wargadinata. 2019. "E-Readiness Dalam Penerapan E-Planning Di Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua." *Visioner* 11(2010):517–26.
- Firman, Firman. 2020. "Challenges and Roles of Official Statistics in the Covid-19 Pandemic." *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi* 17(1):89–93.
- Hardiansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi Indikator Dan Implementasinya*.
- Hussin, Nurussobah, and Wan Satirah Wan Mohd Saman. 2015. "A Readiness For Change Model For Dubai E-Government Initiative." *The 12th International Conference E-Society* 149–65.
- Kovacic, Zlatko J. 2007. "A Brave New E-World? An Exploratory Analysis of Worldwide E-Government Readiness, Level of Democracy, Corruption and Globalization." *International Journal of Electronic Government Research (IJEGR)* 1(3):15–32.
- Malek, Inshirah Abdul, Jitendra Pandey, and Vishal Dattana. 2020. "E- Government Service Quality And Its Effectiveness." *Journal of Student Research* 1–10.
- Nento, Firtio, Lukito Edi Nugroho, and Selo. 2017. "Model E-Readiness Untuk Pengukuran Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Smart Government (Studi Kasus Pemerintah Provinsi Gorontalo)." *Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri (SENATI)* B27.1–6.
- Nugroho, Rossi Adi. 2020. "Kajian Analisis Model E-Readiness Dalam Rangka Implementasi E-Government." *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 11(1):65.
- Nugroho, Rossi Adi, and Yuyun Purbokusumo. 2020. "E-Government Readiness : Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government Di Indonesia." *Iptek-Kom* 22(1):1–17.
- Putra, Mohammad Toha, Warsito Warsito, and Nunik Retno Herawati. 2017. "Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam E-Government Pelayanan Publik Di Kabupaten Boyolali." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip* 6(04):21–30.
- Putri, Nur Aslamaturrahmah Dwi. 2018. "E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penerapan E-Government (Studi Terhadap Kepri Smart Province)." *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(1):173–92.
- Rosana, Elly. 2014. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS* 10.
- Suharto, E. 2007. *Kebijakan Publik Sebagai Kebijakan Publik*. Vol. 2. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Taufik, and Kandung Sapto Nugroho. 2020. "Mengelola Perubahan Dalam Organisasi Tetap Survive Menghadapi Tantangan Global." *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 6(1):75–88.
- Zulfa, Lala Laila, Euis Mauna Mujibah, and Zahra Fitrah Rajaguguk. 2020. "Pelatihan Penggunaan Perangkat Berbasis Internet Dalam Pengumpulan Data Penelitian Masa Pandemi COVID-19." *Educivilia: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 1(2):143.
- Skripsi**
- Hakim, Rizki Fadillah Lukmanul. 2017. "Pelaksanaan Bandung Intergrated Manpower Management Application (BIMMA) Dalam Mempermudah Masyarakat Pencari Kerja Kota Bandung Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bandung." Pasundan University.
- Sinaga, Ezekiel Sinaga. 2018. "Efektivitas Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA Di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung." Padjadjaran University.
- Dokumen**
- Bandung Dalam Angka Tahun 2020.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2020.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Website**
- Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. 2021. Diakses melalui <https://disnaker.bandung.go.id/> pada bulan Maret 2021.
- Puspita, R. 2020. LIPI: Metode Digital Alternatif Riset Saat Pandemi. *Republika.co.id*. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/qch5oe428/li-pi-metode-digital-alternatif-riset-saat-pandemi> pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 15.41 WIB
- Sumber Lainnya**
- Asep Sumaryana, Heru Nurasa, & Dedi Sukarno. 2020. *Pendekatan Penelitian, Desain Penelitian, dan Metode Penelitian dalam Menyusun dan Penulisan Tigas Akhir* (Edisi Kedua). Sumedang: Tim Dosen MPA Program Studi Administrasi Publik FISIP Unpad.